

PERAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI
(Studi Komunikasi Dalam Organisasi PKK di Desa Ngringo
Dan Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar)



Oleh
Thomas Aquinas Gutama
S2204016

PRODI ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

PERAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI
(Studi Komunikasi Dalam Organisasi PKK di Desa Ngringo
dan Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar)



Oleh
Thomas Aquinas Gutama
S2204016

Disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji :

Pembimbing I Dra Prahastiwi Utari, MSi, PhD

Pembimbing II Dra Hj Trisni Utami, MSi

DAFTAR ISI :

	Halaman
1. Halaman judul	i
2. Abstractedly	ii
3. Abstrak	iii
4. Kata Pengantar	iv
5. Daftar Isi	v
6. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
7. BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	10
A. Landasan Teori	10
B. Kerangka Pikir	29
8. BAB III METODOLOGI	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Jenis penelitian	31
C. Waktu Penelitian	32
D. Obyek Penelitian	32
E. Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Sampling	34
H. Validitas data	35

I. Teknik Analisis Data	36
9. BAB IV SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	38
A. Sajian Data	38
B. Pembahasan	63
10. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	100



Abstract

Thesis with title Role of Communications In Organization study role of communications in PKK organization by Thomas Aquinas Gutama S220416. Research done in Ngringo countryside and Dagen countryside, Jaten District, Sub-Province Karanganyar.

Communications represent very important element in taking care of the continuity of life in organization, where change earn to member. Organizational Construction of Prosperity Family (PKK) alter name with Enableness and Prosperity of Family. That Change also concerning mission and vision. This change of course have to be communicated by official member to member in grass root. The role of this Communications become this research focus.

This research represent research dekriptif qualitative, depicting existing communications pattern in Enableness organization and Prosperity of Family (PKK). Approach of cultural and organizational communications. Organizational communications have focus at how that message is sent to member. In organizational communications of vital importance also creating of organizational climate, so that with the existence of organizational climate and organizational communications an organization will walk effectively. Considering organization represent a group of individual having a purpose with, hence utilizing target attainer need the existence of values and guidance agreed on with. Is for that needed by the existence of organizational culture, to be member behavior there is in band which agreed on.

Data collecting use Purposive sampling with variation maximum, so that express the existence of difference or equation among official member and member in accepting message from official member of organization. Data triangulation conducted with triangulation is source of that is compare checked by source other source . Data analysis use told modell interaktif by Milles and Huberman.

In research obtained by change data which cymbal by official member of center in the form of decision, ought to be communicated to member. Practically this communications experience of resistance. That resistance because of communications which have been formed since PKK formed with top-down startegi. Do not expanding organization culture it entangling member in activity of PKK.

Conclusion from this research is the importance of inculcating organizational culture and also applying of organizational communications and also organizational climate. By peeping out 3 the factor, organization will walk effectively.

Abstrak

Tesis dengan judul Peran Komunikasi Dalam Organisasi studi peran komunikasi dalam organisasi PKK oleh Thomas Aquinas Gutama S2204016. Penelitian dilakukan di desa Ngringo dan desa Dagen, kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

Komunikasi merupakan unsure yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup suatu organisasi, di mana perubahan-perubahan dapat disebar-luaskan kepada anggota. Organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mengubah nama dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Perubahan itu juga menyangkut misi dan visinya. Perubahan ini tentu saja harus dikomunikasikan oleh pengurus ke anggota-anggota di akar rumput. Peran komunikasi inilah yang menjadi focus penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, menggambarkan pola komunikasi yang ada dalam organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komunikasi organisasi dan budaya organisasi. Komunikasi organisasi mempunyai focus pada bagaimana pesan itu disampaikan kepada anggota. Dalam komunikasi organisasi sangat penting pula diciptakannya iklim organisasi, sehingga dengan adanya iklim organisasi dan komunikasi organisasi suatu organisasi akan berjalan secara efektif. Mengingat organisasi merupakan sekumpulan individu yang mempunyai tujuan bersama, maka guna pencapaian tujuan perlu adanya pedoman dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Untuk itu diperlukan adanya budaya organisasi, agar perilaku anggota ada dalam jalur yang telah disepakati.

Pengumpulan data menggunakan purposive sampling dengan maximum variation, sehingga mencerminkan adanya persamaan atau perbedaan antara pengurus dan anggota dalam menerima pesan dari pengurus organisasi. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi sumber yaitu membandingkan sumber yang diteliti dengan sumber lain. Analisis data menggunakan interaktif model yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman.

Dalam penelitian ini diperoleh data perubahan-perubahan yang dicanangkan oleh pengurus pusat dalam bentuk keputusan-keputusan, seharusnya dikomunikasikan ke anggota-anggota. Pada kenyataannya komunikasi ini mengalami hambatan-hambatan. Hambatan itu dikarenakan komunikasi yang telah terbentuk sejak PKK dibentuk dengan strategi top-down. Tidak berkembang budaya organisasi yang melibatkan anggota dalam kegiatan PKK.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya menanamkan budaya organisasi serta penerapan komunikasi organisasi serta iklim organisasi. Dengan memunculkan 3 faktor tersebut, organisasi akan berjalan secara efektif.

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendekatan struktural menjelaskan bahwa perubahan dalam masyarakat terjadi secara gradual melalui proses penyesuaian. Sedangkan pendekatan konflik melihat bahwa perubahan sosial merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat dan bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. (Nasikun, 1987). Dari kedua pendekatan tersebut nampak bahwa perubahan selalu ada dan merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara gradual, tetapi dapat juga terjadi secara drastis. Perubahan harus dilihat sebagai proses sosial yang terus menerus tanpa henti, suatu kehidupan sosial akan nampak ketika proses sosial itu terus berjalan.

Dalam masyarakat terdapat suatu konstruksi sosial yang telah disepakati bersama dan dijalankan merupakan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan konstruksi sosial ini akan selalu ditinjau kembali bila masyarakat memandang perlu. Masyarakat dengan budaya patriarki, dominasi laki-laki terhadap perempuan sangat nampak. Laki-laki menguasai sektor publik dan perempuan berada di sektor domestik, akibatnya hanya laki-laki yang dapat mengembangkan dirinya. Laki-laki sebagai kepala keluarga yang berhak menentukan keputusan-keputusan dalam keluarga, sementara perempuan hanya berada di belakang. Konstruksi sosial ini dibangun dan telah dijalankan bersama dalam masyarakat dengan budaya patriarki. Perempuan dengan rela menerima perlakuan itu dan berada dalam dominasi laki-laki.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia pendidikan yang semakin maju, memungkinkan adanya perubahan-perubahan pola pikir dalam masyarakat. Perempuan dapat mengikuti pendidikan setinggi mungkin sama halnya dengan laki-laki. Kemajuan dalam pendidikan ini mengubah cara pikir perempuan yang tadinya hanya berada dalam sektor domestik, kini ikut juga dalam sektor publik. Sri Mulyani, Miranda S.Gultom, Megawati, merupakan contoh perempuan yang berkiprah dalam sektor publik, yang mampu bersaing dengan laki-laki. Keberadaan dan keterlibatan perempuan di sektor publik mulai dapat diterima oleh masyarakat. Lambat tapi pasti perubahan pandangan masyarakat tentang perempuan mengalami kemajuan, walaupun belum semua dapat menerimanya. Konstruksi sosial masyarakat tentang perempuan yang harus berada dalam sektor domestik menjadi sesuatu yang dipertanyakan kembali. Kemampuan perempuan harus diperhitungkan dalam sektor publik, karena pada kenyataannya perempuan dapat duduk bersama dengan laki-laki untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan.

Di sisi lain, perempuan dengan gigih memperjuangkan haknya untuk dapat mengembangkan dirinya. Berbagai seminar, pelatihan, berita di media massa, berusaha untuk menyamakan persepsi mereka tentang perempuan yang mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Lembaga swadaya masyarakat didirikan untuk membela hak perempuan yang tertindas, baik dalam keluarga maupun dalam bekerja mencari nafkah. Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diundangkan untuk membela perempuan dari kekerasan yang selalu menimpanya, karena perempuan seringkali dieksploitasi dan dirampas haknya. Dalam era orde baru peningkatan peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat mendapat perhatian yang

commit to user

besar dari pemerintah. Perhatian pemerintah pada waktu itu sebatas pada peranan yang diberikan, belum mencakup haknya. Ini membuktikan bahwa hak-hak perempuan untuk mengembangkan dirinya masih terbelenggu oleh konstruksi sosial yang ada dan hidup dalam masyarakat. Gerakan perempuan berusaha untuk “menggugat” budaya patriarki yang membelenggunya, perempuan secara bersama-sama membangun konstruksi sosial yang baru di mana perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Ini merupakan suatu proses kehidupan yang dinamis, di mana kehidupan sosial selalu bergerak dalam perubahan. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai suatu sistem yang kaku, melainkan suatu jaringan antar hubungan yang luwes. Suatu realitas yang ada dalam masyarakat, bahwa dalam masyarakat terjadi realitas hubungan antarindividual yang mengikat orang menjadi suatu kehidupan bersama.

Sejarah mencatat kongres I perempuan Indonesia diadakan pada tanggal 22-26 Desember 1928 di Yogyakarta. Apa yang menjadi latar belakang diadakannya kongres tidak jelas. Sejarah perjuangan pergerakan perempuan di Indonesia sebenarnya jauh sebelum tahun 1928 telah terjadi. Ini dapat dilihat dari aktivitas gerakan yang terjadi :

- th 1905 Dewi Sartika mendirikan sekolah “Keutamaan Istri” di Bandung
- th 1912 Kartini mendirikan sekolah perempuan di Semarang
- th 1915 Rahma El Junusia mendirikan sekolah agama di Minangkabau

Dilihat dari aktivitasnya, gerakan perempuan telah terjadi sejak lama, dan apa yang menjadi dasar dan tujuan dari perjuangan perempuan adalah emansipasi. Perjuangan perempuan pada waktu itu masih terjadi kesimpangsiuran pendapat. Perjuangan

perempuan belum menyentuh berbagai aspek kehidupan, karena masih diliputi kecemasan dan ketakutan untuk mengarahkan perjuangannya ke ranah publik.

Menjelang kongres ke 2 perempuan Indonesia, terjadi perpecahan dalam pergerakan perempuan. Pada masa itu muncul dua masalah penting yang dihadapi perempuan, yaitu poligami dan perceraian dua masalah yang ditakuti oleh perempuan. Poligami dan perceraian mendapat dukungan dari agama dan tradisi.

Kongres ke 3 perempuan Indonesia terjadi tahun 1932, di mana gerakan perempuan mulai memikirkan masalah politik. Gerakan perempuan bertekad untuk berpartisipasi dalam kegiatan laki-laki melawan penjajah Belanda. Organisasi perempuan yang menonjol aktiivitas dalam bidang politik adalah Isteri Sedar, yang mendapat dukungan dari Soekarno. Muncul juga gerakan perempuan yang bernama Gerakan Wanita Sedar. Organisasi ini banyak peminatnya dari kalangan Marhaen kelas bawah, karena kegiatan-kegiatannya menyangkut masalah-masalah kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Pada tahun 1934 gerakan ini berubah nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia. Perjuangan gerakan wanita ini ada dalam kalangan rakyat miskin dan berorientasi pada masalah kemiskinan dan keadilan sosial, agaknya cocok dengan perjuangan PKI dan PKI mempengaruhi gerakan ini. Akibatnya gerakan ini pecah menjadi dua, yaitu Gerwani yang “murni” dan Gerwani yang “terpengaruh”.

Pada tahun 60 an pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa semua organisasi massa harus bernaung di bawah payung partai politik. Karena perpecahan dalam organisasi Gerwani sulit untuk dihindari, maka Gerwani merencanakan kongres pada bulan Desember 1965, tetapi karena pecahnya pemberontakan PKI

maka kongres itu batal diadakan dan Gerwani dituduh sebagai salah satu bagian dari PKI.

Pada era orde baru, organisasi-organisasi perempuan ditata kembali. Karena keterlibatan Gerwani dalam “drama” di Lubang Buaya, membuat trauma tersendiri bagi gerakan-gerakan perempuan untuk terlibat dalam masalah politik. Gerakan-gerakan perempuan yang berwawasan keadilan bagi perempuan menjadi kabur.

Ketakutan orde baru terhadap gerakan perempuan, maka gerakan-gerakan perempuan sangat dikuasai dan diarahkan guna mendukung keberhasilan roda pemerintahan. Muncullah organisasi PKK dan Dharma Wanita, di mana pengurus intinya disesuaikan dengan hirarki jabatan suaminya di kantor. Organisasi ini sangat dikendalikan oleh pemerintah melalui suami-suami yang bekerja pada instansi-instansi.

Pada tahun 80 an muncul organisasi-organisasi perempuan non pemerintah yang bukan ormas. Organisasi-organisasi ini bergerak dalam semua aspek kehidupan, dan muncul di berbagai daerah.

Secara ringkas Nunuk P.Murniati membuat periodisasi gerakan perempuan sebagai berikut :

No	Periode	Sifat Gerakan
1	Sebelum penjajahan	Tidak terekam faktanya
2	Th 1602-1928	Gerakan bersifat individual
3	Th 1928-1945	Gerakan perempuan sebagai ibu, paham ibuisme melawan penjajahan

4	Th 1946-1965	Gerakan perempuan melawan kemiskinan dan ketidakadilan
5	Th 1966-1980	Gerakan PKK, perempuan berpartisipasi dalam pembangunan
6	Th 1980-1998	Gerakan PKK terpecah menjadi dua kelompok besar : a. gerakan perempuan yang mendukung pembangunan b. gerakan perempuan menuju kepada keadilan gender
7	Th 1998- sekarang	Gerakan berjejaring internasional,nasional menuju pada keadilan gender dan bersifat inklusif melalui peningkatan wawasan perempuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat

(A.Nunuk P.Murniati,2004;21)

Kalau dicermati secara seksama, gerakan perempuan selalu menuntut kesetaraan gender yang sesuai dengan jamannya. Perjuangan Kartini menuntut adanya kesamaan memperoleh hak pendidikan yang sama antara laki-laki dan perempuan, Gerakan PKK menuntut keterlibatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, menunjukkan perjuangan perempuan sesuai dengan isu yang berkembang pada jamannya.

Perjuangan pergerakan perempuan selalu menuntut adanya persamaan hak dan kesetaraan gender.

Gerakan PKK yang telah dimulai sejak tahun 1966 sampai sekarang masih terus diberlakukan dalam masyarakat, apakah masih relevan untuk masa kini. Pertanyaan ini muncul karena gerakan PKK yang masih berlangsung di tingkat RT,RW hingga Nasional hanya berkisar pada arisan dan simpan pinjam. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang topik utamanya justru dipertanyakan. Sepuluh program pokok PKK sangat sarat dengan muatan domestifikasi perempuan, perempuan dibebani dengan setumpuk masalah dari lingkungan, koperasi, pendidikan, kesehatan. Sehingga perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak mengembangkan dirinya. Kepengurusan PKK mengikuti jabatan suami, sehingga gerakan-gerakan yang dianggap menyimpang segera dapat diatasi. Ini merupakan suatu ketakutan orde baru terhadap gerakan perempuan, sehingga semua gerakan perempuan harus dibatasi dengan ketat.

Perkembangan PKK terus berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya, semula kepengurusan PKK mengikuti jabatan yang dipegang oleh suaminya. Contohnya ketua PKK di tingkat RT dijabat oleh isteri ketua RT, dan sekarang telah berubah, ketua PKK di tingkat RT dipilih oleh ibu-ibu di RT tersebut. Ini menunjukkan adanya kemajuan dalam bidang organisasi PKK, karena setiap ibu yang mempunyai kemampuan memimpin dapat memimpin kelompoknya. Demikian juga dengan misinya untuk mengembangkan dirinya, dengan memasukkan tuntutan akan kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, merupakan suatu tuntutan agar “swargo nunut, nroko katut” tidak lagi melekat dalam diri perempuan. Perempuan

melalui PKK mengusahakan kesetaraan dengan laki-laki, merupakan suatu usaha gerakan perempuan yang menggugat budaya patriarki yang mencengkeram perempuan selama berabad-abad. Bagaimana gerakan perempuan lewat PKK ini akan berhasil? Sesuatu yang belum mendapatkan jawaban secara pasti, karena budaya patriarki yang telah berabad-abad itu berlaku di hampir belahan dunia ini sudah begitu “mendarah daging” dalam masyarakat. Keadaan ini masih diperkuat oleh tradisi-tradisi agama yang menunjukkan bahwa laki-laki yang dapat memimpin bangsanya. Di lain pihak laki-laki yang sudah menikmati enakanya budaya patriarki tentu saja tidak dengan serta merta menyerahkan hak kaum perempuan untuk berkembang menyamai dirinya. Gerakan PKK yang menuntut kesetaraan harus mendapatkan dukungan dari kaum laki-laki, ini merupakan permasalahan yang menggelitik untuk diteliti.

Perubahan-perubahan yang ada dalam tubuh PKK, apakah benar telah dipahami bersama oleh para anggotanya. PKK merupakan organisasi perempuan yang mempunyai skala yang besar, mampukah memberikan pemberdayaan bagi anggotanya. Pemberdayaan yang dilihat Keppi Sukesi (2003:188) sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan, suatu proses stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki, melatih dan meningkatkan kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Berkaitan dengan konsep bahwa PKK dapat dianggap sebagai sumber pemberdayaan (empowering) perempuan, ada sesuatu yang menarik untuk dikaji dalam proses yang sedang berjalan ini. Sebagai suatu kajian dalam ilmu Komunikasi, menarik untuk dilihat bagaimana proses itu terjadi mulai dari keterlibatan para

commit to user

pelaku-pelaku komunikasi (komunikator dan komunikannya, isi pesan yang dibahas di dalamnya, penggunaan media yang memungkinkan serta efek yang muncul yang berkaitan dengan pemberdayaan tersebut).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dimunculkan di atas, secara umum penelitian ini ingin melihat bagaimana pola-pola komunikasi dalam organisasi PKK:

1. Bagaimana dan sejauh mana komunikasi dan budaya organisasi diterapkan dalam Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (peran komunikator dan komunikan, isi pesan, dan pola komunikasi)
2. Bagaimana efek pola komunikasi dalam PKK yang berkaitan terhadap pemberdayaan keluarga, dimata perempuan maupun dimata laki-laki.

C. Tujuan Penelitian

1. Melihat/menjelaskan peran komunikator dan komunikan yang ada dalam PKK dilihat dari kepengurusan dan anggotanya, arus informasi dan isi pesan yang disampaikan
2. Melihat/menjelaskan efek pola komunikasi dalam PKK yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, baik dari sudut pandang perempuan itu sendiri maupun laki-laki.

D. Manfaat Penelitian

1. Memperoleh kajian teori – teori komunikasi organisasi dan budaya organisasi, serta penerapannya dalam organisasi
2. Mendapatkan gambaran penerimaan issue kesetaraan, baik dari sudut pandang perempuan maupun laki-laki.

commit to user

BAB II

ORIENTASI TEORITIK

A. Deskripsi Teoritik

1. Konsep Komunikasi

1.a Pengertian komunikasi

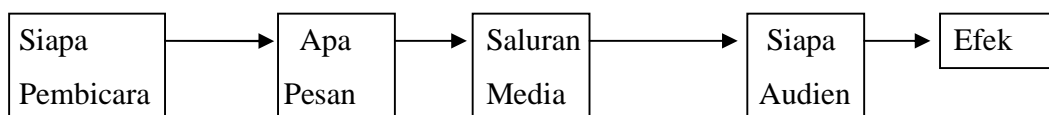
Dalam setiap masyarakat wajar kalau terjadi perubahan social, karena masyarakat berinteraksi dengan masyarakat luar. Dalam berinteraksi masyarakat menggunakan komunikasi, sehingga ide-ide, gagasan-gagasan dapat disampaikan. Demikian juga dengan penelitian ini komunikasi digunakan oleh organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk menyampaikan gagasan pengurus pusat kepada anggota di tingkat bawah. Komunikasi menurut Everett M.Rogers : “ adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka” (dalam Deddy Mulyana, 2001, 62). Sedangkan Gerald R. Miler mengatakan : “komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima” (dalam Deddy Mulyana, 2001.62). Hovland, Janis dan Kelly memberikan definisi komunikasi sebagai berikut : “communication is the process by which an individual transmits stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals”. (dalam Arni Muhammad,, 2005,2) Sedangkan Forsdale mengatakan :”communication is the process by which a system is established, maintained, and altered by means of shared signals that operate according to rules.” (dalam Arni Muhammad, 2005, 2). Sedang Bernard Berelson dan Gary A.Steiner menyatakan :”Komunikasi: transmisi informasi, gagasan, emosi,

ketrampilan, dan sebagainya, dengan menggunakan symbol-simbol – kata-kata, gambar, figure, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasa disebut komunikasi” (Deddy Mulyana, 2001,62). Raymond S Ross mengatakan :”komunikasi (intensional) adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan symbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud komunikator.” Melihat definisi-definisi yang dikatakan oleh para ahli tersebut dapat ditarik simpulan bahwa:

- a. komunikasi sebagai suatu proses pengalihan ide, gagasan dari suatu sumber kepada pihak lain.
- b. komunikasi sebagai generalisasi makna, dimana apa yang diterima oleh komunikan dapat dimaknai sama dengan apa yang dimaksud oleh komunikator.

Lebih lanjut Harold Lasswell mengatakan ;”untuk melihat cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana.” (dalam Deddy Mulyana, 2001, 62). Melihat pernyataan Lasswell maka dalam komunikasi terdapat paling tidak ada 5 (lima) unsure yaitu (1) Siapa sebagai sumber atau pengirim. (2) Mengatakan apa, merupakan pesan yang dikirimkan kepada penerima, (3) Dengan Saluran Apa yaitu media yang digunakan oleh pengirim kepada penerima, (4) Kepada siapa, penerima yang dituju oleh pengirim pesan, dan (5) Dengan Pengaruh Bagaimana yaitu perubahan tingkah laku penerima dengan

diterimanya pesan yang disampaikan oleh sumber. Untuk mempermudah pemahaman komunikasi dari Lasswell dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1 : Pola Komunikasi model Lasswell

(dalam Arni Muhammad,, 2005, 6)

Dalam model Lasswell ini belum memperhitungkan adanya gangguan ketika pengirim pesan menggunakan saluran, yang menurut Shannon diistilahkan dengan “noise”, sehingga pesan itu tidak dapat sempurna oleh penerima.

1.b. Tingkatan-tingkat dalam Komunikasi

Ada beberapa sarjana komunikasi membagi komunikasi menjadi 2 (dua) kategori besar yaitu : komunikasi intrapribadi dan komunikasi antarpribadi, tetapi lebih banyak sarjana yang sependapat bila komunikasi intrapribadi termasuk dalam pembahasan teori komunikasi. Sehingga pembahasan-pembahasan teori komunikasi berada dalam komunikasi antarpribadi. Luasnya komunikasi antarpribadi ini, masih dibagi lagi ke dalam bagian-bagian yang dapat dipelajari secara lebih spesifik. Komunikasi antarpribadi ini dibagi menjadi beberapa kategori :(Deddy Mulyana, 2001:74)

1. Komunikasi kelompok yaitu komunikasi dalam kelompok yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, misalnya kelompok diskusi, arisan RT, dan sebagainya)

2. komunikasi public yaitu komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak) yang tidak bisa dikenali satu sama lain.
3. komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik. Komunikasi ini ditujukan untuk sejumlah besar orang yang tersebar ke berbagai tempat, disampaikan secara serempak.
4. komunikasi organisasi yaitu komunikasi yang terjadi dalam organisasi, bersifat formal dan informal.

Dalam penelitian ini focus pada komunikasi organisasi, di mana organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyebarluaskan visi dan misinya yang baru kepada seluruh anggota yang tersebar di pelosok tanah air. Suatu wawasan baru tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam menuju kesejahteraan keluarga, dimana wawasan ini sangat bertentangan dengan budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.

1.c. Komunikasi Organisasi

Dalam komunikasi organisasi perlu diperhatikan adanya 3 unsur yang saling berkait yaitu :

1. Iklim organisasi
2. Iklim komunikasi
3. Aliran komunikasi

Iklm organisasi menunjukkan adanya suasana yang dialami oleh anggota organisasi, sehingga anggota dapat melakukan komunikasi dengan anggota yang lain. Tagiuri (1968) menyatakan iklim organisasi adalah kualitas yang relative abadi dari lingkungan internal organisasi yang dialami oleh anggota-anggotanya, mempengaruhi tingkah laku mereka serta dapat diuraikan dalam istilah nilai-nilai suatu set karakteristik tertentu dari lingkungan. (dalam Arni Muhammad, 2005: 82). Pemikiran lain dikemukakan oleh Payne dan Pugh (1976) yang mendefinisikan iklim organisasi sebagai suatu konsep yang merefleksikan isi dan kekuatan dari nilai-nilai umum, norma, sikap, tingkah laku dan perasaan anggota terhadap suatu system social.(dalam arni Muhammad, 2005: 82). Sementara itu Hillriegeer dan Slocum mengatakan; iklim organisasi adalah suatu set atribut organisasi, yang mungkin disebabkan oleh cara-cara organisasi atau subsistem, terhadap anggota dan lingkungannya (Arni Muhammad, 2005: 83). Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesepakatan bahwa iklim organisasi adalah suatu konsep tentang suasana yang ada dalam organisasi yang memungkinkan anggota dan pengurus melakukan komunikasi.

Iklm komunikasi menurut Denis (1975) sebagai kualitas pengalaman yang bersifat obyektif mengenai lingkungan internal organisasi yang mencakup persepsi anggota organisasi terhadap pesan dan hubungan pesan dengan kejadian yang terjadi di dalam organisasi.(Arni Muhammad,2005: 86). Iklim komunikasi suatu organisasi akan sangat berpengaruh terhadap iklim organisasi yang ada. Iklim organisasi yang baik akan menumbuhkan peran aktif anggota dalam kegiatan organisasi. Dengan iklim organisasi dan iklim komunikasi yang penuh persaudaraan dan semangat kebersamaan untuk memiliki organisasi, akan menumbuhkan adanya partisipasi,

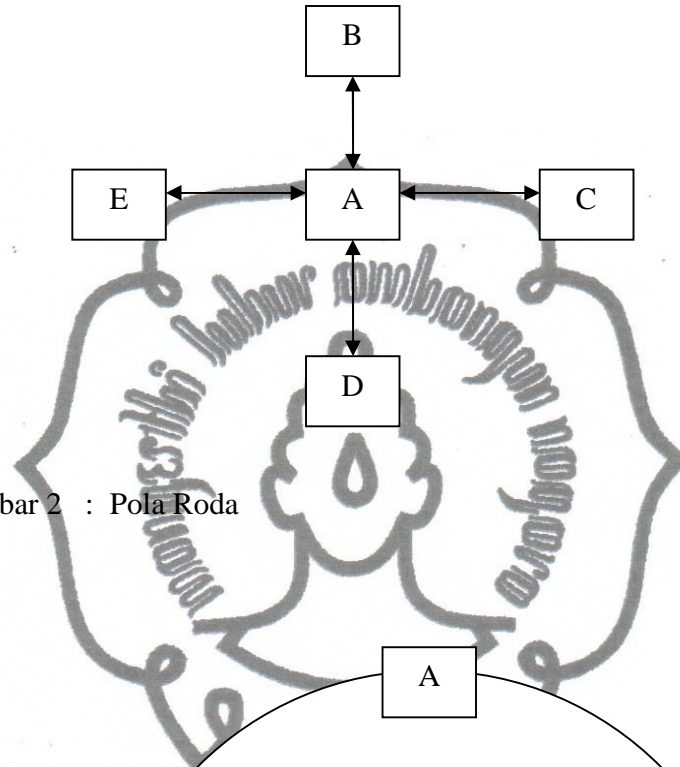
commit to user

kepercayaan, dan keterbukaan. Perasaan sebagai anggota dan memiliki organisasi akan membuat organisasi itu memiliki “roh” yang menghidupkan. Untuk itu penting adanya kesepakatan bersama bagaimana aliran informasi dan arah aliran informasi dalam organisasi itu dibuat.

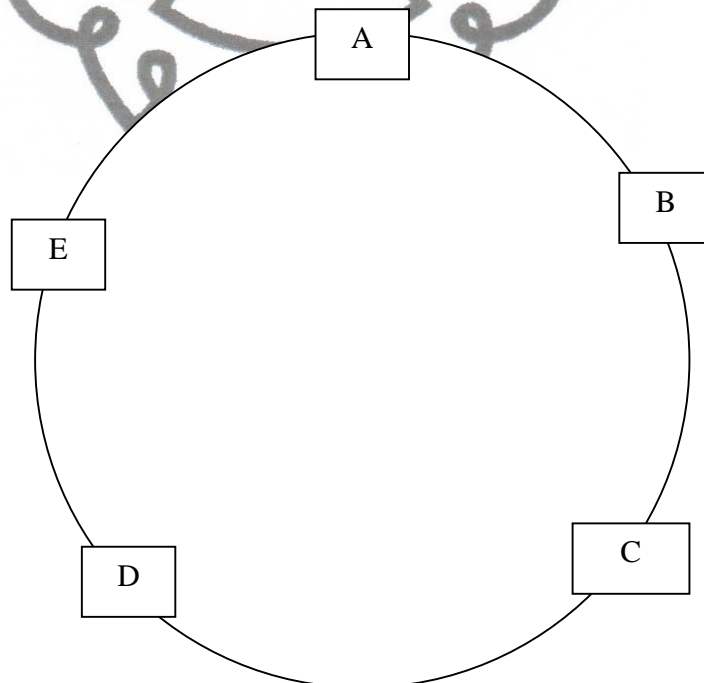
Organisasi merupakan sekumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama, oleh karena itu komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam dinamika organisasi. Penyebar-luasan informasi merupakan suatu tantangan besar bagi organisasi. Perkembangan teknologi komunikasi hanya merupakan alat bantu dalam penyebar-luasan informasi, yang penting dalam penyebar-luasan bagaimana informasi itu dapat diterima ke seluruh bagian dan anggota-anggota organisasi. Aliran informasi akan membentuk suatu jaringan komunikasi yang memungkinkan pesan disebar-luaskan. Pesan dapat disampaikan kepada anggota dapat terjadi secara serentak atau secara berurutan. Pesan secara serentak adalah yang disampaikan ke beberapa tempat dalam waktu yang relative sama. Pesan secara berurutan adalah pesan yang disampaikan melalui tingkatan-tingkatan tertentu, misal Rektor yang menyampaikan kebijakan baru melalui Dekan, Dekan menyampaikan ke segenap Dosen melalui Ketua jurusan. Dalam penyampaian pesan secara berurutan ini, waktu diterimanya pesan akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Sifat aliran informasi mempunyai pola aliran informasi yang berkembang dalam organisasi. “Siapa berbicara kepada siapa” mempunyai konsekuensi besar dalam fungsi organisasi. Pesan yang disampaikan oleh seorang Bupati akan ditanggapi berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh Ketua RT walaupun materi

yang disampaikan sama. Ada 2 (dua) pola dalam aliran informasi yaitu (1) pola Roda dan (2) pola Lingkaran. Perbedaan kedua pola dapat dilihat gambar sebagai berikut :



Gambar 2 : Pola Roda



Gambar 3 : Pola Lingkaran

commit to user

Pola roda adalah pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral, sedangkan pola lingkaran memungkinkan semua anggota berkomunikasi satu dengan yang lainnya hanya melalui sejenis system pengulangan pesan (Wayne Pace dan Faules, 2006,174). Dari hasil penelitian para ahli pola roda dan pola lingkaran mempunyai perbedaan sebagai berikut :

Variabel komunikasi organisasi	Pola roda	Pola lingkaran
Aksesibilitas para anggota dg yg lain	Rendah	Tinggi
Pengawasan lairan pesan	Tinggi	Rendah
Moral atau kepuasan	Sangat rendah	Tinggi
Kemunculan pemimpin	Tinggi	Sangat rendah
Kecermatan solusi	Baik	Buruk
Kecepatan kinerja	Cepat	Lambat
Jumlah pesan yg dikirim	Rendah	Tinggi
Kemunculan organisasi yg stabil	Cepat	Sangat lambat
Penyesuaian dg perubahan kerja	Lambat	Cepat
Kecenderungan beban berlebih	Tinggi	Rendah

Bicara tentang komunikasi organisasi, maka pembicaraan terfokus pada perpindahan informasi secara formal dari :

1. seseorang yang mempunyai otoritas yang lebih tinggi kepada seseorang yang mempunyai otoritas lebih rendah (komunikasi ke bawah)

2. seseorang yang mempunyai otoritas yang rendah kepada seseorang yang mempunyai otoritas lebih tinggi (komunikasi ke atas)
3. seseorang kepada orang lain yang mempunyai otoritas yang sama (komunikasi hirzontal)

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerjasama dalam jangka waktu yang relative lama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan nilai-nilai, norma-norma yang dipakai sebagai pedoman anggota dalam berperilaku dalam organisasi, yang sering disebut dengan budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda dengan organisasi lainnya, sehingga budaya organisasi seringkali menjadi kebanggaan bagi anggotanya.

1.d. Budaya Organisasi

Organisasi sebagai suatu kumpulan individu yang mempunyai tujuan bersama yang hendak dicapai mempunyai aturan-aturan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut mengikat anggota ke dalam organisasi tersebut, sehingga gerak dan langkah individu sebagai anggota dipersatukan untuk mencapai tujuan. Untuk mengkoordinasikan perilaku anggota dalam suatu organisasi, diperlukan adanya pengurus yang akan membagi tugas kepada anggota-anggotanya. Pembagian tugas tentu saja tidak berdasar pada kemauan dan kepentingan diri pengurus, melainkan berdasar pada aturan, norma dan nilai yang berlaku dalam organisasi. Norma dan nilai yang berlaku dalam organisasi akan menjadi pedoman bagi anggota dan pengurus dalam menjalankan tugas masing-masing. Hal ini yang sering disebut dengan budaya organisasi.

Pengertian Budaya Organisasi

Budaya organisasi menurut Stephen P. Robbins merujuk pada suatu system pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota lainnya. Sistem pengertian bersama ini, merupakan serangkaian karakter penting yang menjadi nilai bagi suatu organisasi. (2002,279). Sementara itu Jerald Greenberg dan Robert A. Baron (dalam Wibowo, 2010 : 17) menyatakan bahwa budaya organisasi sebagai kerangka kerja kognitif yang terdiri dari sikap, nilai-nilai, norma perilaku dan harapan yang diterima bersama oleh anggota organisasi. Robert P. Vecchio memberikan definisi budaya organisasi sebagai nilai-nilai dan norma-norma bersama yang terdapat dalam suatu organisasi dan mengajarkan pada pekerja yang datang. Definisi ini menganjurkan bahwa budaya organisasi menyangkut keyakinan dan perasaan bersama, keteraturan dalam perilaku dan proses historis untuk meneruskan nilai-nilai dan norma-norma. (dalam Wibowo, 2010 : 17). Pendapat para ahli tersebut mengajarkan bahwa dalam suatu kumpulan individu yang selanjutnya disebut sebagai organisasi, memiliki nilai dan norma yang dipahami bersama. Dengan berpegang pada nilai dan norma itu anggota organisasi paham tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana berperilaku dalam organisasinya.

Karakteristik Budaya Organisasi

Pengertian-pengertian tentang budaya organisasi menunjukkan adanya beberapa karakteristik dari budaya organisasi, dengan mana pengertian itu menunjukkan bahwa ada serangkaian proses dari organisasi yang harus dipahami oleh anggota. Pemahaman tentang nilai dan norma akan mendasari perilaku anggota. Serangkaian proses itu menunjukkan adanya beberapa karakteristik dari budaya organisasi. Jerald

commit to user

Greenberg dan Robert A. Baron (1997:471, Wibowo, 2010 : 36) menunjukkan adanya 7 (tujuh) karakteristik budaya organisasi sebagai berikut :

1. Innovation, suatu tingkatan di mana orang diharapkan kreatif dan membangkitkan gagasan baru
2. Stability, bersifat menghargai lingkungan yang stabil, dapat diperkirakan, dan berorientasi pada peraturan
3. Orientation toward people, merupakan orientasi untuk menjadi jujur, mendukung, dan menunjukkan penghargaan pada hak individual
4. Result-orientation, meletakkan kekuatannya pada kepeduliannya untuk mencapai hasil yang diharapkan
5. Easygoingness, suatu keadaan di mana tercipta iklim kerja bersifat santai
6. Attention to detail, dimaksudkan dengan berkepentingan untuk menjadi analitis dan seksama
7. Collaborative orientation, merupakan orientasi yang menekankan pada bekerja dalam tim dari bekerja secara individual.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Stephen P Robbins bahwa adanya 7 (tujuh) elemen penting dalam budaya organisasi yaitu :

1. Inovasi dan pengambilan risiko : tingkat daya pendorong karyawan untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko
2. Perhatian terhadap detail : tingkat tuntutan terhadap karyawan untuk mampu memperlihatkan ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap detail

3. Orientasi terhadap hasil : Tingkat tuntutan terhadap manajemen untuk lebih memusatkan perhatian pada hasil, dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut
4. Orientasi terhadap individu : tingkat keputusan manajemen dalam mempertimbangkan efek-efek hasil terhadap individu yang ada dalam organisasi
5. Orientasi terhadap tim : Tingkat aktivitas pekerjaan yang diatur dalam tim, bukan secara perorangan
6. Agresivitas : Tingkat tuntutan terhadap orang-orang agar berlaku agresif dan bersaing, dan tidak bersikap santai
7. Stabilitas : Tingkat penekanan aktivitas organisasi dalam mempertahankan status quo berbanding pertumbuhan. (2002,279)

Fungsi Budaya Organisasi

Budaya organisasi, seperti juga lazimnya budaya pada umumnya, mempunyai fungsi bagi organisasi. Stephen P. Robbins melihat ada empat fungsi budaya organisasi :

1. Budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya kerja menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain
2. Budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi
3. Budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individual

commit to user

4. Budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan system social (2001, Eddy Sutrisno 2010;10)

Robert Kreitner dan Angelo Kinicki melihat fungsi dari budaya organisasi sebagai berikut :

1. Memberikan anggota identitas organisasional, menjadikan perusahaan diakui sebagai perusahaan yang innovative dengan mengembangkan produk baru. Identitas organisasi menunjukkan ciri khas yang membedakan dengan organisasi lain yang mempunyai sifat khas yang berbeda.
2. Memfasilitasi komitmen kolektif, perusahaan mampu membuat pekerjanya bangga menjadi bagian daripadanya. Anggota organisasi mempunyai komitmen bersama tentang norma-norma dalam organisasi yang harus diikuti dan tujuan bersama yang hendak dicapai.
3. Meningkatkan stabilitas system social sehingga mencerminkan bahwa lingkungan kerja dirasakan positif dan diperkuat, konflik dan perubahan dapat dikelola secara efektif. Dengan kesepakatan bersama tentang budaya organisasi yang harus dijalani mampu membuat lingkungan dan interaksi social berjalan dengan stabil dan tanpa gejolak
4. Membentuk perilaku dengan membantu anggota menyadari atas lingkungannya. Budaya organisasi dapat menjadi alat untuk membuat orang berpikiran sehat dan masuk akal (2001: 73, Wibowo 2010: 490)

2. Konsep Kesetaraan Gender

Hampir semua masyarakat di muka bumi ini menganut budaya patriarki yang memandang laki-laki lebih dari pada perempuan. Sejalan dengan perkembangan pemikiran muncullah gerakan feminisme yang mendobrak budaya patriarki.

Feminisme radikal muncul sebagai reaksi atas kultur diskriminasi sosial yang berdasarkan pada jenis kelamin. Feminisme radikal ini melihat penindasan laki-laki terhadap perempuan berakar pada laki-laki itu dengan ideologi patriarkhinya, dimana dengan ideologi patriarki itu laki-laki mendasari penindasannya terhadap perempuan. Bagi feminisme radikal, revolusi terjadi pada setiap perempuan yang telah mengambil aksi untuk merubah gaya hidup, pengalaman dan hubungan mereka terhadap kaum laki-laki. Gerakan feminisme radikal melihat revolusi dan perlawanan atas penindasan perempuan bisa dilakukan dengan bentuk yang sangat personal, tetapi juga dapat dilakukan sebagai suatu gerakan perempuan secara bersama untuk menentang segala bentuk penindasan terhadap perempuan.

Pada zaman kapitalisme, penindasan terhadap kaum perempuan dilanggengkan karena berbagai alasan yang menguntungkan. Salah satunya karena tenaga perempuan dihargai kurang dari tenaga laki-laki, itulah sebabnya ketika memasukkan perempuan dalam perburuhan sangat diterima. Perempuan dilihat sebagai cadangan buruh yang tak terbatas jumlahnya dan sangat kecil upahnya, sehingga dalam meraih keuntungan yang besar tenaga kerja perempuan dapat dilibatkan dalam industrialisasi.

Bagi feminisme Marxis, penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari sistem eksploitasi yang bersifat struktural, sehingga mereka berpendapat patriarki

tidak dapat dipersalahkan dalam penindasan terhadap kaum perempuan. Tetapi sistem kapitalislah yang bertanggung jawab terhadap penindasan terhadap perempuan, sehingga penyelesaiannya juga melalui jalur struktur yaitu dengan melakukan perubahan-perubahan dalam struktur kelas. Perubahan dalam struktur kelas itulah yang disebut dengan revolusi, itulah sebabnya musuh utama kapitalis setelah komunis adalah feminisme.

Setelah selesainya revolusi itu, belum terjamin adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan masih dirugikan dengan urusan domestik yang menjadi tanggung jawab mereka. Oleh karena itu Engels mengusulkan urusan rumah tangga ditransformasikan menjadi industri sosial, serta urusan menjaga dan mendidik anak jadi urusan publik, maka perempuan akan mencapai kesetaraan yang sejati (Mansour Fakih, 1997). Sementara itu Endang Sumiarni(2004), menyatakan bahwa banyak pengertian yang diungkapkan untuk menunjuk pada gender. Tetapi dari berbagai pengertian itu pada umumnya sependapat bahwa pengertian gender itu menunjuk adanya peran dan kedudukan yang diberikan oleh masyarakat di mana tercermin adanya hubungan yang tidak simetris. Perbedaan jenis kelamin bukan merupakan gender, karena perbedaan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Kodrat seorang perempuan, ia mampu mengandung, melahirkan, dan menyusui, merupakan kodrat yang telah diberikan oleh yang Maha Kuasa, sehingga manusia harus menerimanya. Perbedaan-perbedaan gender dapat diubah lantaran yang menjadi akarnya adalah faktor-faktor sosial dan sejarah. Kedua faktor itu yang membentuk dan menentukan perbedaan-perbedaan gender yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Gender merupakan pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Dalam masyarakat patriarki, dominasi lebih pada kaum laki-laki. Laki-laki bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, sehingga perempuan dan anak-anak menjadi makhluk yang dikuasai. Sosialisasi tentang siapa yang berkuasa di dalam keluarga, ditanamkan sejak dini. Perempuan dilihat sebagai seseorang yang ada dalam ranah domestik, yang harus tunduk pada laki-laki. Akibatnya hubungan-hubungan sosial diinformasikan oleh laki-laki ke dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat, hal ini berdampak pada penindasan pada perempuan.

Studi gender lebih menekankan pada perkembangan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang, sedangkan seks lebih menekankan pada perkembangan aspek biologis dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Proses pertumbuhan menjadi seorang anak laki-laki atau menjadi anak perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender dari pada seks. Dengan demikian istilah seks itu menunjuk pada aspek biologis seorang laki-laki atau perempuan, menyangkut soal jumlah kromosom, pola genetik dan struktur genital. Sedangkan gender lebih menekankan pada perkembangan maskulinitas dan feminitas seseorang yang terjadi dalam struktur sosial budaya, serta aspek nonbiologis. Arief Budiman berpendapat bahwa pria dan wanita mempunyai perbedaan secara biologis, tidak dapat dipungkiri. Masing-masing dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda. Kelompok Biological essentialist berpendangan bahwa perbedaan itu membawa implikasi pada terbentuknya dikhotomi peran gender, yaitu peran maskulin dan feminin. Peran femininlah yang cocok untuk peran keibuan. Berhubungan wanita itu mempunyai alat reproduksi yang dianugerahkan kepadanya, maka akan memberikan implikasi berstereotype gender.

commit to user

Perbedaan hormonal dalam tubuh antara pria dan wanita menyebabkan adanya perbedaan dalam kekuatan dan kemampuan. Pria mempunyai hormon testoteron lebih agresif dibandingkan wanita yang mempunyai hormon prolactin. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan tidak menimbulkan perbedaan pendapat, tetapi efek dari perbedaan itu yang menimbulkan perbedaan pada perilaku manusia khususnya relasi gender yang menyebabkan perdebatan. Kaum feminist berpendapat bahwa perbedaan peran gender bukan karena kodrat, tetapi faktor budaya yang menentukannya.

Faktor budaya menyebabkan adanya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Faktor budaya dan faktor biologis akan berinteraksi dan terinstitusionalisasi. Institusi sebagai wadah sosialisasi, mewariskan norma-norma secara turun temurun. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan telah tertanam sejak anak masih kecil. Seorang ayah bekerja di kantor dan berada dalam ranah publik, sedangkan seorang ibu memasak di dapur dalam ranah domestik. Figur seorang ayah adalah figur instrumental yang bertugas melindungi keluarga dari bahaya dan mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan perempuan adalah figur ekspresif dengan pekerjaan di sekitar rumah.

Seiring dengan kemajuan teknologi, maka perempuan dapat mengatur sendiri jumlah kelahiran anak, sehingga ia dapat berkiprah dalam sektor publik yang didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu kendala atau perbedaan biologis menjadi tidak relevan lagi. Perbedaan nature adalah sesuatu yang alami tidak dapat diubah lagi, tetapi perbedaan nurture dapat diubah. Dampak kemajuan iptek dapat mengubah persepsi masyarakat tentang keterlibatan perempuan dalam sektor publik. Kesulitan

commit to user

menerima perempuan dalam sektor publik karena tidak adanya kemauan politik secara total dalam menciptakan kulture yang kondusif bagi terciptanya kesetaraan gender. Ini disebabkan karena banyaknya sistem yang dirancang untuk mempertahankan tatanan seperti sekarang ini. Kaum perempuan selalu dilekatkan dengan sifat keibuannya, sehingga semua urusan yang bersangkutan dengan anak dan rumah selalu dibebankan pada perempuan.(Endang Sumiarni, 2004) Muhadjir M Darwin , melihat masalah pemberdayaan perempuan dalam kehidupan bernegara kembali penting untuk dibahas, karena kita ada pada titik simpang yang dapat membawa perempuan kedua arah yang berlawanan. Komitmen negara terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender belum cukup kuat, sehingga banyak persoalan perempuan yang belum terpecahkan.

Konsep emansipasi selalu dilekatkan pada sosok Kartini sebagai pejuang perempuan, walaupun ia bukan seorang politisi. Karena hidupnya ada dalam kehidupan kelas atas, maka sudah barang tentu ia harus mengikuti serangkaian kegiatan yang membelenggunya. Sejak umur 12 tahun Kartini harus meninggalkan sekolahnya, mengikuti tradisi kaum bangsawan Jawa. Pikiran Kartini sangat revolusioner melalui surat-suratnya kepada teman-temannya di Belanda. Pikiran Kartini sangat dikuasai oleh keinginannya untuk menyejajarkan perempuan dengan laki-laki, meskipun akhirnya harus menyerah karena budaya patriarki yang sangat kuat hidup dalam kehidupan bangsawan.

Pergerakan kaum perempuan secara nyata nampak dalam masa pemerintah Soeharto. Dua hal yang perlu dicatat dalam masa itu bagi perjuangan perempuan :

Pertama dikeluarkannya UU perkawinan tahun 1974, yang membatasi secara ketat terhadap pegawai negeri yang ingin melakukan poligami. Ini menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap perempuan. Kedua, dibentuknya Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita, yang mempunyai tugas untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan dan memberdayakan perempuan dalam ranah publik. Melalui Kementerian ini kebijakan-kebijakan publik yang berperspektif gender dibangun, dan kebijakan yang bias gender dapat dicegah. Kementerian ini dapat proaktif merespon isu-isu perempuan yang mendasar.

Selain mencatat hal-hal yang positif, ada beberapa hal negatif yang perlu mendapat perhatian. Pertama, organisasi-organisasi perempuan dikondisikan sebagai subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Organisasi perempuan menegaskan posisi perempuan sebagai pedamping suami, berarti meletakkan status, eksistensi, dan kehormatan perempuan dalam bayang-bayang suami. Kedua, masa soeharto adalah masa kooptasi organisasi-organisasi dalam wadah tunggal, termasuk organisasi perempuan. Kooptasi dalam wadah tunggal ini berarti membatasi ruang gerak organisasi. Penyatuan organisasi perempuan dilihat sebagai pembrangusan ide dan sangat bertentangan dengan asas demokrasi. (Muhadjir M Darwin, 2005)

3. Konsep Pemberdayaan

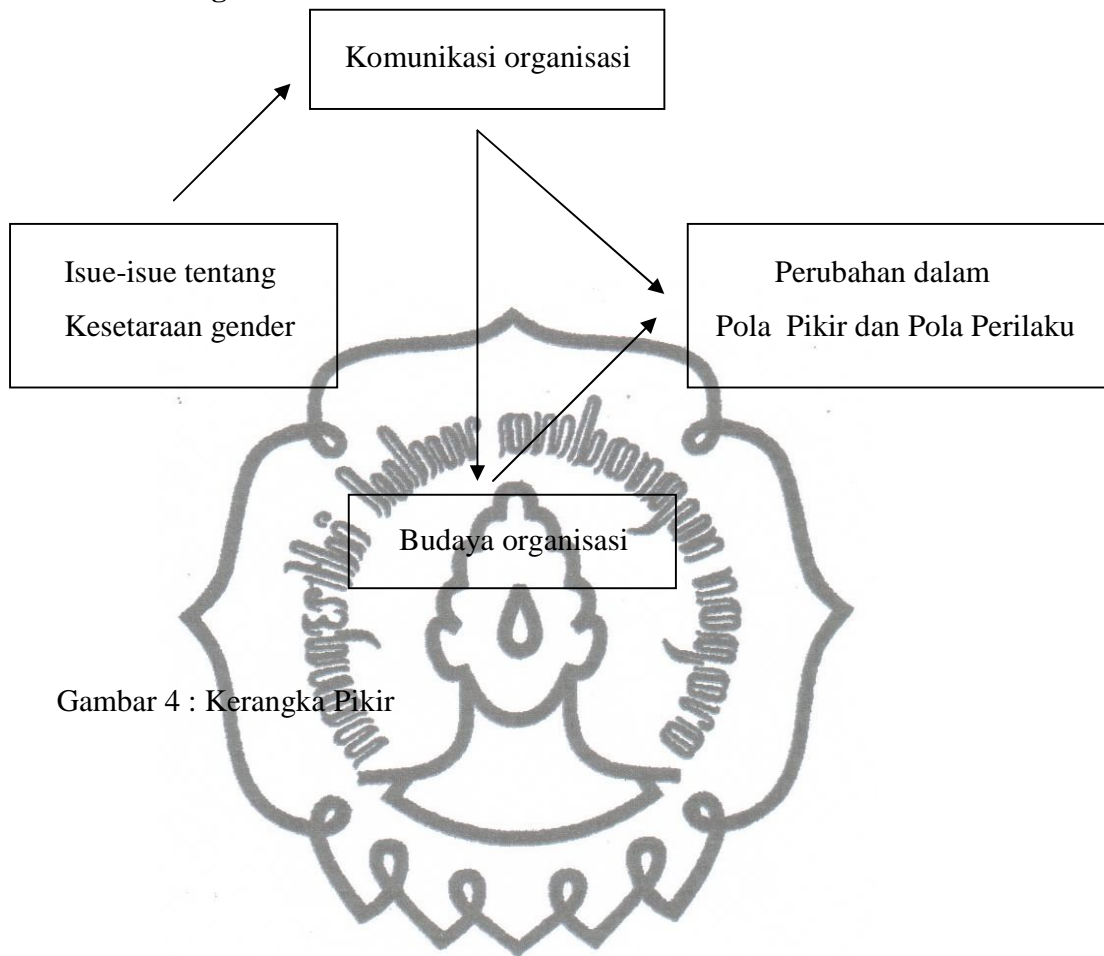
Konstruksi sosial bahwa perempuan lemah dan perlu diberdayakan supaya dapat setara dengan laki-laki, mengundang usaha-usaha pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan itu menurut Ambar Teguh Sulistiyani dimaknai sebagai suatu proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (2004:77). Karena merupakan suatu proses, Anwar

mengatakan ada 6 proses yang harus dilalui dalam pemberdayaan, yaitu : penyadaran, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan. (2007,35). Sedangkan Ambar Teguh Sulistiyani mengatakan proses pemberdayaan itu harus melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. (2004; 83)

Proses atau tahap-tahap itu yang harus dilalui oleh PKK dalam memberdayakan anggotanya, sehingga tercipta adanya kesetaraan gender dalam rumah tangga anggotanya. Untuk itu perlu adanya komunikasi antara pengurus dengan anggotanya, sehingga pesan-pesan dari tingkat pusat sampai ke anggota di RT/RW dapat diterima dengan baik.

B. Kerangka Pikir



Gambar 4 : Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kabupaten Karanganyar. Kabupaten ini ini dipilih karena merupakan kota yang masyarakatnya relative homogen sebagai masyarakat yang masih menganut budaya patriarki terutama karena dekat dengan lingkungan karaton Surakarta. Masyarakat kabupaten Karanganyar dipimpin oleh seorang bupati perempuan, menunjukkan adanya kesediaan masyarakat menerima kesetaraan gender.

Pemilihan kecamatan Jaten sebagai lokasi penelitian karena di kecamatan ini banyak perumahan-perumahan baru dan mobilitas penduduk untuk bekerja di luar kabupaten cukup banyak. Mobilitas penduduk ini akan mewarnai cakrawala pemikiran masyarakatnya.

Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan, dimulai pada bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Juli 2007

B. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang dirancang, penelitian ini lebih menekankan pada proses, maka bentuk penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif kualitatif. Bentuk ini dipilih karena penelitian ini dipandang lebih cocok untuk mengungkap berbagai informasi dan mampu mencapai pemahaman yang mendalam terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan strategi studi kasus tunggal, karena penelitian ini akan dilakukan pada satu lokasi dan fokus kajian hanya pada satu komunitas yang relative

homogen. Informasi yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam dari beragam perspektif yang diterapkan dalam penelitian ini guna memperoleh kesimpulan studi, maka studi ini merupakan penelitian studi kasus tunggal (Sutopo, 2002). Studi kasus ini sifatnya adalah studi kasus terpancang, karena peneliti telah memancang fokus, yaitu komunikasi sosial budaya yang berwawasan ideologi gender.

Dilihat dari segi pengumpulan data, penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian yang demikian dilakukan dengan jalan mempelajari secara langsung terhadap fenomena sosial yang diteliti dari berbagai sumber yang ditemui di lapangan dan dipandang layak untuk dijadikan sumber data, untuk dapat memahami fenomena yang tidak diprediksikan sebelumnya dan mengembangkan kesimpulan umum sementara yang mendorong pengamatan dan pemahaman lebih lanjut dan mendalam.

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian dasar, maka kesimpulan yang akan dihasilkan pada dasarnya hanya berlaku secara terbatas pada komunitas yang diteliti. Karena penelitian ini merupakan penelitian ilmiah, maka penerapan hasil kesimpulan untuk lokasi lain dapat dipakai sebagai masukan.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data digali dari beberapa sumber data yaitu :

- a. Masyarakat di kecamatan Jaten, dalam hal ini diambil di dua desa yaitu desa Ngringo dan desa Dagen
- b. Dokumen PKK yang berupa rangkuman hasil RAKERNAS.

D. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pada awal tahap pengumpulan data, peneliti akan mengadakan kunjungan pada pengurus PKK Kecamatan Jaten. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama guna memperlancar proses pengumpulan data yang akan dilakukan. Pada pertemuan ini juga diharapkan akan mendapatkan informasi awal yang akan sangat berguna dalam menyusun petunjuk wawancara. Dalam pertemuan ini peneliti mendapat petunjuk untuk menemui pengurus PKK di tingkat Desa.

Dalam pertemuan di tingkat desa, peneliti diarahkan untuk bertemu dengan kader desa. Ini disebabkan pengurus di tingkat desa adalah pengurus yang baru, sehingga informasi-informasi yang mendetail tidak dapat diperoleh. Kader yang ditunjuk adalah seorang kader yang mewakili kecamatan sebagai kader di kabupaten, dan pernah mewakili kader kabupaten untuk diusulkan menjadi kader teladan. Dari pertemuan dengan kader desa ini peneliti mengadakan wawancara dengan pengurus PKK tingkat RT/RW serta anggota PKK di RT, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang PKK dengan pola-pola komunikasi yang terjadi dalam PKK.

Tahap inti pengumpulan data yang akan dilaksanakan dengan menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam

Tehnik ini diterapkan secara lentur dan terbuka, tidak terstruktur secara ketat dan tidak formal, agar informasi yang dikumpulkan memiliki kedalaman yang cukup (Sutopo,2002). Kelenturan dan kelonggaran diterapkan untuk menggali kejujuran

informan dalam memberikan jawaban yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan sikap, pandangan dan pengalaman para aktivis dalam melaksanakan tugasnya.

2. Observasi langsung

Dalam mengamati tempat dan berbagai aktivitas informan, observasi akan dilakukan dengan berperanserta di mana peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya (Lexy J. Moleong, 2004:117). Dalam observasi berperan, peneliti memilih berperanserta secara pasif baik secara formal maupun informal, sehingga subyek merasa tidak sedang diteliti. Observasi langsung ini akan dilakukan bersamaan dengan proses wawancara, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Guna menjamin validitas data dalam penelitian yang akan dilakukan ini menerapkan triangulasi, dimana dalam triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif, artinya menarik simpulan yang mantap diperlukan tidak hanya dari satu cara pandang (Sutopo, 2002:78). Dalam penelitian kualitatif dikenal ada empat triangulasi :

Triangulasi sumber dalam triangulasi sumber mengarahkan peneliti agar dalam mengumpul data menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data. Peneliti bisa memperoleh data dari narasumber (manusia) yang berbeda posisinya dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya.

Dalam triangulasi sumber ini yang ditekankan adalah informasi dari beberapa sumber, dan bukan pada tekniknya, sehingga kebenaran data dapat diperoleh secara mantap.

Triangulasi metode: triangulasi metode digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan berbagai metode untuk menguji kemantapan informasinya.

Triangulasi penyidik/peneliti : triangulasi penyidik atau peneliti ini dengan cara hasil penelitian baik data maupun simpulannya diuji validitasnya dengan membandingkan data maupun simpulan dari peneliti yang lain.

Triangulasi teori: triangulasi ini dilakukan peneliti dalam mengkaji masalah yang ditelitinya dengan menggunakan lebih dari satu teori. Dengan menggunakan beberapa perspektif akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap. (Denzin,dalam Lexy J.Moleong,2004: 178, Sutopo, 2002 : 79).

Dalam penelitian ini triangulasi yang akan dipakai adalah triangulasi data/sumber. Dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang

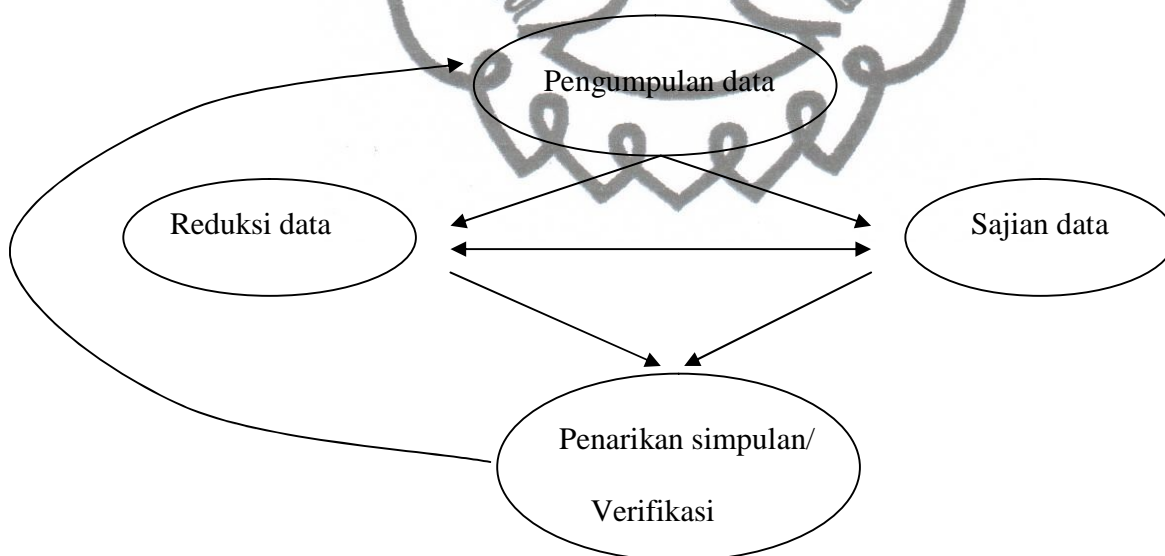
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Lexy J.Moleong,2004:178).

Cara ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar teruji kebenarannya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan diterapkan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Dalam penerapan model ini peneliti akan melakukan analisis secara interaktif tiga komponen analisis, yaitu : reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. Aktivitasnya akan dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.

Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :



Gambar 5 : Model analisa interaktif

Sumber : Miles dan Huberman (dalam Sutopo,2002:96)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pemahaman tentang PKK

PKK yang berdiri pada tahun 1980 an merupakan suatu organisasi perempuan yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud mewadahi gerakan perempuan mulai dari tingkat RT sampai pada tingkat pemerintahan pusat. Lamanya perjalanan dan keluar masuknya anggota mengakibatkan pemahaman anggota PKK diberbagai tingkatan menunjukkan tidak adanya pengertian atau pemahaman tentang arti PKK . Dari penelitian ini ada 3 kategori pemahaman tentang PKK yaitu :

- a. PKK diartikan sebagai kelompok arisan Ibu-Ibu di RT

Arisan merupakan suatu bentuk kegiatan menabung dari sekelompok orang, dimana sekelompok orang tersebut berkumpul pada suatu periode waktu tertentu dan mengumpulkan sejumlah uang yang telah disepakati bersama. Uang yang telah terkumpul itu akan diberikan kepada salah satu anggota kelompok, secara bergantian sampai semua anggota kelompok mendapatkan. Arisan ini semula bersifat non profit dan hanya berdasar pada keguyuban kelompok guna mensiasati kebutuhan-kebutuhan diluar pengeluaran rutin. Ikatan yang berdasar paguyuban inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh suatu kelompok sebagai pengikat agar anggotanya dapat hadir dalam kegiatan rutusnya, sehingga setiap pertemuan selalu diisi dengan arisan. Demikian juga dengan PKK, jauh sebelum munculnya PKK arisan telah hidup dalam masyarakat, terutama di kalangan kaum Ibu Lahirnya PKK yang berorientasi pada

perempuan menggabungkan diri dengan kegiatan arisan ibu-ibu di RT, sehingga kegiatan rutin PKK diidentikkan dengan arisan ibu-ibu.

Pada dewasa ini arisan berkembang dan tujuannya juga berubah, yang semula non profit menjadi suatu kegiatan yang menguntungkan baik bagi penyelenggara maupun bagi anggotanya. Keanggotaan yang semula bersifat paguyuban, berubah menjadi keanggotaan yang bersifat kontraktual dan formal. Dilihat dari segi pemanfaatannya juga berkembang, sehingga muncul berbagai macam arisan seperti; arisan sepeda motor, arisan mobil, arisan haji, arisan rumah dan sebagainya. Inti pokok dari arisan yang tidak berubah adalah mengutamakan kesejahteraan anggotanya.

PKK yang semula muncul sebagai suatu organisasi perempuan yang ada di lingkungan RT, dimaknai sebagai kelompok arisan. Ini disebabkan karena munculnya PKK ada di kalangan Ibu-Ibu RT dan setiap pertemuannya selalu diselingi dengan arisan. Hal ini nampak dalam wawancara dengan informan sebagai berikut :

“PKK itu merupakan perkumpulan ibu-ibu se RT dan secara struktural di bawah PKK RW, demikian juga PKK RW berada di bawah PKK Desa. Agar aktivitas berkumpul itu banyak yang datang, maka dibentuk arisan dan simpan pinjam.” (Wawancara dengan Ibu Yantono tanggal 25 Mei 2007)

” perkumpulan ibu-ibu di RT itu yang dinamakan dengan PKK RT, di atasnya ada PKK RW dan seterusnya sampai pada tingkat pusat. Dalam pertemuan PKK RT itu berisi informasi-informasi dari PKK Desa. Supaya kehadiran ibu-ibu dapat ajeg, maka diisi dengan arisan, simpan-pinjam dan kegiatan sosial lainnya”. (Wawancara dengan Ibu Yani tanggal 27 Mei 2007)

“ PKK itu perkumpulan ibu-ibu baik itu RT, RW, Desa, sampai tingkat pusat. PKK RT itulah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga PKK RT lah yang melakukan kegiatan yang berdasar pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh PKK Desa. Arisan itu bukan yang pokok, tetapi hanya sekedar sarana untuk mengikat kehadiran ibu-ibu. Tetapi yang terjadi sekarang justru arisan yang lebih menonjol, dibandingkan dengan kegiatan PKK nya itu” (wawancara dengan Ibu Mulyoto tanggal 28 Mei 2007)

“PKK pertemuan Ibu-Ibu baik di RT, RW, Desa sampai ketingkat provinsi dan pusat “. (Wawancara dengan Ibu Muryadi tanggal 5 Juni 2007)
”setahu saya PKK itu arisan Ibu-Ibu di RT” (wawancara dengan ibu Sukardi, 6 Juni 2007)

Kelima informan tersebut merupakan anggota PKK RT simpang siur tidak memberikan definisi yang tegas tentang apakah PKK itu. Mereka melihat PKK sebagai organisasi perempuan yang ada di masyarakat baik di RT, RW, sampai ke tingkat pusat. Agar kehadiran anggota relative ajeg, maka diselingi dengan arisan dan kegiatan simpan pinjam agar pertemuan itu menarik. Arisan dilihat sebagai cara untuk menabung dalam kebersamaan, sedangkan simpan pinjam dilihat sebagai suatu cara untuk menutup kebutuhan yang mendadak. Dalam simpan pinjam anggota dapat memenuhi kebutuhan yang incidental dan anggota tidak merasa dirugikan, karena bunga pinjaman akan dinikmati bersama oleh semua anggota PKK. Dalam pertemuan tersebut pesan tetap dapat disampaikan kepada anggota PKK, walaupun mendapat porsi yang relative sedikit dibandingkan dengan acara-acara yang lain.

b. Suatu organisasi perempuan yang dibentuk oleh pemerintah

Pada masa pemerintahan orde baru, organisasi perempuan menjadi salah satu perhatian pemerintah. Pemerintah pada masa itu mempunyai rasa takut pada organisasi perempuan, karena sejarah membuktikan bahwa peran perempuan dalam mendukung gerakan pemberontakan PKI mempunyai andil yang cukup besar. Untuk mengatasi dan mengawasi gerakan perempuan maka pemerintah orde baru membentuk suatu organisasi perempuan dengan nama PKK. Untuk mempermudah pengawasan gerak dari organisasi ini, maka pemerintah membuat peraturan tentang

commit to user

kepengurusan PKK yang mengikuti jenjang karier suami dalam pemerintahan. Pada perjalanannya aturan-aturan itu berubah, dan dalam penelitian ini dikemukakan oleh beberapa informan :

” PKK itu wadah organisasi perempuan yang ada di masyarakat dan dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena itu PKK itu berjenjang seperti pemerintahan, mulai dari RT, RW, Desa, Kecamatan hingga pemerintahan pusat. Anggota PKK RT itu semua Ibu yang ada di wilayah suatu RT, sedangkan di RW anggotanya perwakilan dari RT-RT yang ada di RW itu”. (Wawancara dengan Ibu Sukiyato tanggal 29 Mei 2007)

” PKK organisasi wanita yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga keberadaan organisasi itu mulai dari tingkat RT hingga Pusat. Organisasi ini memang mengalami beberapa kali perubahan, tadinya kepengurusan itu mengikuti jabatan suami di masyarakat, tetapi sekarang tidak harus mengikuti jabatan suami. Ini dimaksudkan agar mereka yang mempunyai potensi untuk memimpin dapat mengaktualisasikan dirinya, sehingga PKK dapat berkembang sesuai dengan program-programnya”.(wawancara dengan Ibu Rujito, tanggal 30 Mei 2007)

”semula ada arisan ibu-ibu di RT dengan maksud untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Tetapi kemudian pemerintah membentuk organisasi perempuan yang disebut PKK. Maka arisan ibu-ibu di RT itulah yang disebut dengan PKK RT.” (wawancara dengan Ibu Suharti, 6 Juni 2007)

Pemerintah Orde baru nampaknya mempunyai perhatian yang cukup serius terhadap organisasi-organisasi perempuan, di lembaga-lembaga pemerintahan perhatian pada organisasi perempuan ditunjukkan dengan pembentukan organisasi Dharma Wanita. Sedang dalam masyarakat, organisasi perempuan itu diwadahi dengan PKK. Organisasi-organisasi itu mempunyai tujuan politis, yaitu dapat mengawasi gerakan perempuan lewat semua jalur yang dapat digunakan. Gerakan perempuan diwaspadai oleh pemerintah, karena gerakan-gerakan perempuan dimasa sebelum orde baru memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap gerakan/pemberontakan organisasi yang memayunginya. Ketakutan orde baru

commit to user

terhadap gerakan perempuan memunculkan pembentukan organisasi Dharma Wanita dan PKK sebagai suatu cara untuk mengontrol dan mengendalikan gerakan-gerakan perempuan. Oleh karena itu wajar terjadi pemahaman bahwa PKK merupakan organisasi bentukan pemerintah.

c. Sebagai organisasi perempuan yang memberdayakan

Kehidupan suatu organisasi akan berkembang sesuai dengan tuntutan jaman, demikian juga dengan PKK, mengalami perubahan baik dalam nama maupun dalam kegiatannya. PKK pada saat ini berbeda dengan PKK pada waktu muncul pertama kali. Perubahan-perubahan terus menerus berlangsung sesuai dengan tuntutan jaman. Pertama kali munculnya PKK kepengurusan mengikuti jabatan suami, misalnya suami menjabat ketua RT, maka ketua PKK RT adalah isteri dari ketua RT. Karena dirasa tidak cocok lagi dengan jaman, maka ada perubahan dalam kepengurusan di tingkat RT yaitu ketua PKK RT tidak harus isteri ketua RT. Perubahan berikutnya adalah masalah keanggotaan PKK, perubahan ini bersamaan dengan perubahan pada nama PKK itu sendiri. Semula PKK itu merupakan singkatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kini menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Suatu pemberdayaan keluarga bukan monopoli dari perempuan, melainkan usaha bersama antara suami dan isteri mengupayakan adanya pemberdayaan dalam keluarga. Sehingga anggota PKK bukan lagi perempuan saja, melainkan juga laki-laki sebagai kepala keluarga menjadi anggota PKK.

Dalam budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat, mempunyai kecenderungan bahwa laki-laki yang mendominasi kekuasaan dalam semua aspek kehidupan keluarga. Seiring dengan kemajuan jaman dan dibarengi dengan

commit to user

perubahan pandangan yang mendunia, pola kekuasaan yang didominasi laki-laki harus dibagi dengan perempuan. Perempuan juga mempunyai potensi untuk berkembang sejajar dengan laki-laki, apabila diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan diri. Stigma yang terlanjur hidup dalam masyarakat menganggap bahwa perempuan itu lemah, tidak rasional, lembut, sehingga harus berada di dalam rumah tangga dengan urusan domestiknya. Untuk mengubah agar perempuan dapat sejajar dengan laki-laki, maka perlu adanya usaha pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan inilah yang harus digarap oleh PKK.

Ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut :

“ PKK suatu organisasi perempuan yang dibentuk oleh pemerintah. Organisasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan dalam menjawab tantangan jaman, sehingga organisasi ini berkembang dari jaman ke jaman. Ini ditunjukkan dengan perubahan nama, yang mengandung arti adanya perubahan dalam organisasi itu. Contohnya perubahan nama yang tadinya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Ada sesuatu perubahan yang ingin dicapai yaitu pemberdayaan perempuan agar dapat mengaktualisasikan diri, ini menjawab tantangan jaman yang menuntut adanya kesetaraan gender. Kesetaraan itu dapat tercapai kalau perempuan juga mempunyai kemampuan, sehingga perlu diberdayakan.” (Wawancara dengan Ibu Tutik Pingad tanggal 7 Juni 2007)

”PKK itu organisasi yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan keluarga para anggotanya.” (wawancara dengan Ibu Sri Guntarti, 6 Juni 2007)

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi tujuan PKK, perempuan masih diidentikan dengan makhluk yang lemah dihadapan laki-laki, sehingga perlu adanya pemberdayaan atau diberdayakan. Demikian juga dengan PKK yang masih beranggapan bahwa perempuan perlu diberdayakan sehingga dapat sejajar dengan laki-laki. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan realita yang ada, karena kesetaraan telah ada dan hidup dalam masyarakat.

Apa yang dinyatakan oleh Ibu-Ibu menunjukkan tidak-adanya konsistensi pemahaman tentang arti PKK. Tidak adanya pemahaman yang sama menunjukkan adanya ketidaksamaan dalam rasa memiliki organisasi itu sendiri, sehingga keanggotaannya dalam organisasi itu sebagai suatu formalitas belaka. PKK itu nampak tidak Internalized dalam anggotanya, sehingga para anggota hanya melakukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Arisan, simpan pinjam merupakan suatu kebutuhan yang lebih diutamakan dari pada pemberdayaan yang menjadi nama dari PKK itu sendiri. Ketidak pahaman tentang arti itu yang menjadikan PKK tidak mempunyai “roh” yang menghidupkan organisasi, keberlangsungan hidup itu sekedar memenuhi tuntutan dari atasan.

Pengertian PKK menurut hasil Keputusan Rakernas VI PKK Nomor 02/KEP/RAKERNAS VI PKK/IV/2005 menyatakan bahwa : Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan

Pengertian yang dibangun oleh para informan dengan rumusan hasil Rakernas menunjukkan bahwa ada distorsi pesan dalam organisasi PKK , sehingga pemahaman tentang arti PKK itu sendiri tidak diketahui dengan benar oleh anggotanya. Banyaknya anggota baru yang tidak mendapatkan sosialisasi tentang PKK, keanggotaannya menjadi pasif. Mereka masuk menjadi anggota PKK sekedar mengikuti pola yang sudah ada, bahwa setelah menikah harus menjadi anggota PKK di wilayah di mana ia tinggal. Keberagaman anggota dalam mengartikan PKK menunjukkan bahwa komunikasi tentang arti PKK ada distorsi pesan sehingga tidak

ada kesamaan pemahaman arti. Adanya keragaman arti mengakibatkan adanya perbedaan dalam partisipasi dalam organisasi.

Proses Komunikasi dalam Organisasi PKK

Kajian komunikasi yang dilihat dalam penelitian ini adalah kajian yang menyangkut proses komunikasi. Berarti yang dikaji mulai dari komunikator, pesan, media dan komunikan serta efek yang timbul.

1. Komunikator.

Yang dimaksud dengan komunikator di sini adalah individu-individu yang ada di dalam PKK, terutama mereka yang duduk sebagai pengurus. Dalam setiap organisasi wajar bila ada pengurus dan anggota, dan masing-masing menjalankan perannya dalam organisasi itu. Pengurus dan anggota harus mempunyai pola komunikasi, di mana pesan itu disampaikan kepada anggota atau sebaliknya. Komunikasi organisasi yang baik akan menumbuhkan semangat kebersamaan untuk memajukan organisasinya, sedangkan komunikasi yang tidak baik akan membuat organisasi itu mandeg. Begitu juga dengan PKK, ada pesan yang harus disampaikan kepada anggota, supaya kegiatan ataupun pencapaian tujuan itu dapat tercapai.

Komunikator sebagai pembawa pesan akan menyampaikan pesan yang diterimanya kepada anggota. PKK yang mempunyai jaringan yang amat luas dan berjenjang, tentu saja membutuhkan adanya komunikasi antara pengurus pusat dan daerah sampai ke tingkat yang paling bawah yaitu RT. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pesan itu disampaikan oleh komunikator kepada komunikan tanpa adanya distorsi pesan. Distorsi pesan sangat mungkin terjadi karena adanya proses yang tidak tepat, sehingga pesan ditanggapi secara beragam oleh anggota.

commit to user

PKK sebagai suatu organisasi yang berjenjang, maka tiap jenjang mempunyai ketua dan pengurusnya. Ketua PKK dalam setiap jenjang mempunyai kedudukan sebagai komunikator yang sentral, yang selalu mengarahkan acara setiap kali ada pertemuan atau bahkan sebagai pemimpin pertemuan.

Dalam penyampaian pesan, dan setiap organisasi tentu mempunyai pesan yang harus disampaikan ke anggota, ada komunikator yang membawa pesan. Apalagi dalam organisasi sebesar PKK yang anggotanya tersebar ke seluruh pelosok tanah air, ada yang berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan baik dari anggota ke pengurus dan sebaliknya dari pengurus ke anggota.

Ini dapat dilihat dari informasi dari informan-informan sebagai berikut :

“ biasanya pertemuan-pertemuan itu dibuka oleh sekretaris atau petugas yang ditunjuk, lalu ibu ketua PKK RT menyampaikan informasi dari PKK RW. Kalau ada yang perlu dibicarakan, ya pembicaraan dipimpin oleh ibu ketua. Tapi juga sering terjadi ketika ibu ketua PKK RT selesai memberikan informasi, dilanjutkan dengan laporan seksi-seksi. Dalam pelaporan ini Ibu ketua tetap pegang peran, mungkin dalam penyelesaian masalah yang ada dalam setiap seksi, atau mungkin juga ada usulan dari anggota.” (wawancara dengan ibu Yantono, tanggal 25 Mei 2007)

“Pertemuan-pertemuan itu dibuka oleh Ibu Ketua PKK RT, sedangkan upacara dilakukan oleh petugas yang ditunjuk misalnya pembaca teks Pancasila, lagu Mars PKK, dan sebagainya. Sesudah upacara ya pertemuan dipimpin oleh Ibu ketua, dengan menyampaikan informasi yang diperoleh dari PKK RW. Sesudah itu ya laporan-laporan dari seksi-seksi. Tanggapan atas laporan seksi-seksi ya dipimpin oleh ibu ketua. Ibu ketua itu punya posisi sentral. Kalau ibu ketua berhalangan hadir ya pertemuan jadi cepat selesai” (wawancara dengan ibu Yani, tanggal 27 Mei 2007)

“di PKK RT saya pertemuan-pertemuan itu dipimpin oleh Ibu Ketua PKK RT, tapi karena beliau itu pendiam, yang banyak omong jadi seksi-seksinya. Ibu ketua hanya membuka pertemuan dan menyampaikan informasi dari PKK RW kalau ada, sesudah itu seksi-seksi yang menjalankan kegiatan melaporkan situasi yang ada dan meminta tanggapan dari anggota.” (wawancara dengan ibu Mulyoto, tanggal 28 Mei 2007)

commit to user

“Selaku Ketua PKK RT saya ya seringkali datang pada pertemuan PKK RW, kalau pas ada keperluan yang sangat mendesak ya saya minta bantuan pada pengurus lain untuk mendatangi pertemuan di PKK RW. Dalam PKK RW ada penyampaian informasi dari PKK Desa, dalam penyampaian informasi ini dilakukan oleh wakil RW yang datang pada pertemuan PKK Desa. Baru kemudian Ibu Ketua PKK Rw memberikan penjelasannya atau memilih kegiatan apa yang perlu dilakukan, atau ya sekedar tanya jawab saja” (wawancara dengan Ibu Sukiyato, tanggal 29 Mei 2007)

“Saya ini ketua PKK RT ya bukan, Ketua PKK RW ya bukan, tetapi saya diminta untuk mendatangi pertemuan PKK di Desa. Informasi yang saya peroleh, ya saya sampaikan di pertemuan PKK RW dan RT. Informasi di PKK Desa biasanya disampaikan oleh Ketua PKK, Sekretaris, atau Kader Desa, Ketua-Ketua POKJA” (wawancara dengan ibu Muryadi, tanggal 5 Juni 2007)

“Sebagai Kader Desa tugas saya ya sebagai penghubung antara Desa dan Kecamatan. Kalau di Kecamatan ya saya mendapat informasi-informasi yang harus saya sampaikan pada pertemuan PKK Desa. Tentu saja saya dibantu dengan teman-teman yang lain, karena saya sudah tua.” (wawancara dengan ibu Tutik Pingad, tanggal 7 Juni 2007)

“pola komunikasi di PKK sementara ini bersifat top down, karena sulit mengubah pola komunikasi yang sudah terbentuk pada masa lalu.” (wawancara dengan Ibu Sri Guntarti, 6 Juni 2007)

“karena PKK itu organisasi pemerintah, maka pola komunikasinya ya sama dengan di pemerintahan, sifatnya top down” (wawancara dengan ibu Suharti, 6 Juni 2007)

2. Pesan

Suatu organisasi tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, tujuan tersebut kadang berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh organisasi tersebut. Demikian juga dengan PKK, mengalami beberapa perubahan karena situasi dalam masyarakat. Semula PKK dibentuk untuk mewartakan gerakan perempuan dan untuk mengendalikan semua gerakannya, maka semua pengurusnya mengikuti jabatan suaminya di masyarakat. Misalnya suami menjabat sebagai ketua

commit to user

RT, maka secara otomatis istri menjabat sebagai Ketua PKK RT. Demikian juga bila suami menjabat sebagai Kepala Desa, secara otomatis istri menjabat sebagai Ketua PKK Desa. Hal ini terlepas dari mampu tidaknya seorang istri memimpin suatu organisasi.

Dalam perjalanan sejarahnya, muncul pemikiran bahwa untuk memimpin suatu organisasi dibutuhkan kemampuan dan ketrampilan, sehingga Ketua PKK tidak harus menyesuaikan dengan jabatan suami tetapi bisa dipilih diantara anggota yang dipandang mampu oleh anggota. Dalam PKK kemudian terjadi perubahan bahwa Ketua PKK dipilih oleh anggota, sesuai dengan pilihan anggota. Perubahan yang terjadi kemudian pada misi dari PKK, dimana PKK mengubah namanya menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan mewujudkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu misi ini harus diperjuangkan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga anggota PKK tidak lagi perempuan-perempuan di suatu lingkungan tetapi juga laki-laki atau suaminya. Perubahan-perubahan seharusnya dikomunikasikan sebagai pesan yang harus disampaikan kepada anggota.

Dalam penelitian ini berusaha melihat tema pesan yang disampaikan dalam setiap pertemuan PKK dari wawancara sebagai berikut :

Dalam setiap pertemuan selalu ada tema yang dibahas, demikian juga dengan PKK dalam setiap pertemuannya. Banyak hal yang semestinya dapat dibahas dalam setiap pertemuan, tetapi karena rutinitas pertemuan, seringkali tema tidak ditentukan terlebih dahulu. Akibatnya pertemuan-pertemuan tidak begitu mementingkan tema,

yang penting ada pertemuan. Dalam penelitian ini ada beberapa tema yang seringkali menjadi tema dalam pertemuan.

“Dari dulu saya hanya merasakan pesan-pesan yang disampaikan oleh pengurus ya itu-itu saja. Kalau musim DB ya dihimbau untuk kebersihan lingkungan, kalau mau musin penghujan dihimbau untuk kebersihan selokan, Posyandu, ya sekitar-sekitar itu saja kok” (wawancara dengan Ibu Yantono 25 Mei 2007)

“Saya itu jadi anggota PKK sudah belasan tahun, tapi saya tidak hapal 10 program pokok PKK. Kalau ada pertemuan PKK yang dibicarakan ya cuma itu-itu saja, arisan, lingkungan, posyandu. Nggak ada perubahan sama sekali. Informasi dari RW, dari Desa, itu ya berkisar pada pokja2 saja. Pembicaraan yang agak serius itu kalau mau tirakatan sama halal bi halal saja.” (Wawancara dengan Ibu Yani 27 Mei 2007)

“Dalam setiap pertemuan yang dibicarakan ya cuma arisan, simpan pinjam. Mungkin juga ada informasi dari RW atau Desa. Isi pesannya ya sekitar sepuluh program PKK saja. Kebersihan lingkungan, posyandu, KB, itu-itu saja.” (Wawancara dengan Ibu Mulyoto, 28 Mei 2007)

“Suami saya itu mantan lurah, sehingga dulu saya aktif dalam PKK. Sekarang saya masih aktif PKK di RT dan RW. Apa yang saya alami, saya dengar, saya rasakan, PKK itu dari dulu ya gitu-gitu saja. Di mana-mana yang dibicarakan ya arisan, simpan pinjam, posyandu, lingkungan. Dah hanya itu saja, nggak ada perubahan. Pokoknya sepuluh program pokok PKK saja.” (wawancara dengan Ibu Muryadi, 5 Juni 2007)

“Saya sebagai ketua PKK di RT ini hanya sebagai corong saja, apa yang saya dapatkan dari pertemuan PKK di RW saya teruskan. Yang saya peroleh di PKK RW, ya hal-hal yang berkaitan sepuluh program pokok PKK yang dibagi dalam 4 pokja, Posyandu, lingkungan.” (wawancara dengan Ibu Sukiyato, 29 Mei 2007)

“Sebagai isteri ketua RW ya saya lalu jadi ketua PKK RW. Setiap bulan memang ada pertemuan di desa, tapi biasanya yang datang perwakilan saja. Bergilir dari RT 01 sampai RT 06. Dalam pertemuan-pertemuan itu yang dibahas ya masalah-masalah PKK yang dijabarkan dalam 4 pokja. Informasi itu kemudian disebar-luaskan ke RT-RT pada waktu pertemuan di RW yang diadakan 3 bulan sekali. Informasi itu disebar-luaskan ke anggota di RT lewat Ibu ketua PKK RT.” (wawancara dengan Ibu Rujito, 30 Mei 2007)

“Sebagai kader desa saya yang kerap kali datang pertemuan di kecamatan. Dalam pertemuan di kecamatan yang disinggung ya 4 pokja dalam PKK.

commit to user

Jarang sekali terjadi pembicaraan di luar itu, paling-paling ada disinggung masalah pemberdayaan. Tapi hanya sepintas. Contohnya kalau dulu kita memakai pakaian yang pantas, sekarang bagaimana caranya supaya dapat menjahit pakaian sendiri. Tapi yang diberikan hanya polanya saja, itu yang saya maksud dengan sepintas.” (wawancara dengan ibu Tutik Pingad, 7 Juni 2007)

Dari wawancara yang dilakukan mulai dari anggota PKK tingkat RT sampai Kader PKK Desa, pembicaraan pertemuan sekitar empat pokja yang ada dalam PKK. Dalam PKK tidak nampak adanya perubahan, walaupun perubahan dalam PKK telah berjalan sekitar dua tahun. Komunikasi tentang perubahan yang terjadi dalam PKK tidak dikomunikasikan kepada anggota.

PKK dalam perubahan namanya tetap mengandalkan pada sepuluh program pokok dan pokja-pokjanya. Sepuluh program pokok yang sangat memojokkan perempuan pada ranah domestic tetap dipertahankan, meski pemberdayaan menuju kesetaraan dan keadilan gender menjadi tujuannya.

3. Pesan

Suatu organisasi tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, tujuan tersebut kadang berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh organisasi tersebut. Demikian juga dengan PKK, mengalami beberapa perubahan karena situasi dalam masyarakat. Semula PKK dibentuk untuk mewartakan gerakan perempuan dan untuk mengendalikan semua gerakannya, maka semua pengurusnya mengikuti jabatan suaminya di masyarakat. Misalnya suami menjabat sebagai ketua RT, maka secara otomatis istri menjabat sebagai Ketua PKK RT. Demikian juga bila suami menjabat sebagai Kepala Desa, secara otomatis istri menjabat sebagai Ketua

PKK Desa. Hal ini terlepas dari mampu tidaknya seorang istri memimpin suatu organisasi.

Dalam perjalanan sejarahnya, muncul pemikiran bahwa untuk memimpin suatu organisasi dibutuhkan kemampuan dan ketrampilan, sehingga Ketua PKK tidak harus menyesuaikan dengan jabatan suami tetapi bisa dipilih diantara anggota yang dipandang mampu oleh anggota. Dalam PKK kemudian terjadi perubahan bahwa Ketua PKK dipilih oleh anggota, sesuai dengan pilihan anggota. Perubahan yang terjadi kemudian pada misi dari PKK, dimana PKK mengubah namanya menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan mewujudkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu misi ini harus diperjuangkan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga anggota PKK tidak lagi perempuan-perempuan di suatu lingkungan tetapi juga laki-laki atau suaminya. Perubahan-perubahan seharusnya dikomunikasikan sebagai pesan yang harus disampaikan kepada anggota.

Dalam penelitian ini berusaha melihat tema pesan yang disampaikan dalam setiap pertemuan PKK dari wawancara sebagai berikut :

Dalam setiap pertemuan selalu ada tema yang dibahas, demikian juga dengan PKK dalam setiap pertemuannya. Banyak hal yang semestinya dapat dibahas dalam setiap pertemuan, tetapi karena rutinitas pertemuan, seringkali tema tidak ditentukan terlebih dahulu. Akibatnya pertemuan-pertemuan tidak begitu mementingkan tema, yang penting ada pertemuan. Dalam penelitian ini ada beberapa tema yang seringkali menjadi tema dalam pertemuan.

“Dari dulu saya hanya merasakan pesan-pesan yang disampaikan oleh pengurus ya itu-itu saja. Kalau musim DB ya dihimbau untuk kebersihan lingkungan, kalau mau musin penghujan dihimbau untuk kebersihan selokan, Posyandu, ya sekitar-sekitar itu saja kok” (wawancara dengan Ibu Yantono 25 Mei 2007)

“Saya itu jadi anggota PKK sudah belasan tahun, tapi saya tidak hapal 10 program pokok PKK. Kalau ada pertemuan PKK yang dibicarakan ya cuma itu-itu saja, arisan, lingkungan, posyandu. Nggak ada perubahan sama sekali. Informasi dari RW, dari Desa, itu ya berkisar pada pokja2 saja. Pembicaraan yang agak serius itu kalau mau tirakatan sama halal bi halal saja.” (Wawancara dengan Ibu Yani 27 Mei 2007)

“Dalam setiap pertemuan yang dibicarakan ya cuma arisan, simpan pinjam. Mungkin juga ada informasi dari RW atau Desa. Isi pesannya ya sekitar sepuluh program PKK saja. Kebersihan lingkungan, posyandu, KB, itu-itu saja.” (Wawancara dengan Ibu Mulyoto, 28 Mei 2007)

“Suami saya itu mantan lurah, sehingga dulu saya aktif dalam PKK. Sekarang saya masih aktif PKK di RT dan RW. Apa yang saya alami, saya dengar, saya rasakan, PKK itu dari dulu ya gitu-gitu saja. Di mana-mana yang dibicarakan ya arisan, simpan pinjam, posyandu, lingkungan. Dah hanya itu saja, nggak ada perubahan. Pokoknya sepuluh program pokok PKK saja.” (wawancara dengan Ibu Muryadi, 5 Juni 2007)

“Saya sebagai ketua PKK di RT ini hanya sebagai corong saja, apa yang saya dapatkan dari pertemuan PKK di RW saya teruskan. Yang saya peroleh di PKK RW, ya hal-hal yang berkaitan sepuluh program pokok PKK yang dibagi dalam 4 pokja, Posyandu, lingkungan.” (wawancara dengan Ibu Sukiyato, 29 Mei 2007)

“Sebagai isteri ketua RW ya saya lalu jadi ketua PKK RW. Setiap bulan memang ada pertemuan di desa, tapi biasanya yang datang perwakilan saja. Bergilir dari RT 01 sampai RT 06. Dalam pertemuan-pertemuan itu yang dibahas ya masalah-masalah PKK yang dijabarkan dalam 4 pokja. Informasi itu kemudian disebar-luaskan ke RT-RT pada waktu pertemuan di RW yang diadakan 3 bulan sekali. Informasi itu disebar-luaskan ke anggota di RT lewat Ibu ketua PKK RT.” (wawancara dengan Ibu Rujito, 30 Mei 2007)

“Sebagai kader desa saya yang kerap kali datang pertemuan di kecamatan. Dalam pertemuan di kecamatan yang disinggung ya 4 pokja dalam PKK. Jarang sekali terjadi pembicaraan di luar itu, paling-paling ada disinggung masalah pemberdayaan. Tapi hanya sepiantas. Contohnya kalau dulu kita memakai pakaian yang pantas, sekarang bagaimana caranya supaya dapat menjahit pakaian sendiri. Tapi yang diberikan hanya polanya saja, itu yang

saya maksud dengan sepintas.” (wawancara dengan ibu Tutik Pingad, 7 Juni 2007)

Dari wawancara yang dilakukan mulai dari anggota PKK tingkat RT sampai Kader PKK Desa, pembicaraan pertemuan sekitar empat pokja yang ada dalam PKK. Dalam PKK tidak nampak adanya perubahan, walaupun perubahan dalam PKK telah berjalan sekitar dua tahun. Komunikasi tentang perubahan yang terjadi dalam PKK tidak dikomunikasikan kepada anggota.

PKK dalam perubahan namanya tetap mengandalkan pada sepuluh program pokok dan pokja-pokjanya. Sepuluh program pokok yang sangat memojokkan perempuan pada ranah domestic tetap dipertahankan, meski pemberdayaan menuju kesetaraan dan keadilan gender menjadi tujuannya.

4. Media

Cara penyampaian isi pesan, bisa secara komunikasi interpersonal (langsung) atau melalui media. Cara penyampaian substansi masalah (isi pesan) dalam komunikasi menjadi penting, karena sangat berpengaruh pada penerimaan pesan. Ada beberapa cara yang ditempuh dalam penyampaian pesan yang dilakukan oleh PKK, yaitu :

- Pesan disampaikan secara langsung

Pesan yang disampaikan secara langsung adalah penyampaian pesan yang dilakukan dari pengurus kepada anggota. Bagaimana penyampaian pesan itu dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Pertemuan itu dibuka oleh sekretaris atau petugas yang ditunjuk, lalu Ibu Ketua PKK RT menyampaikan informasi pertemuan PKK RW. Kalau ada masalah yang dibahas, pembicaraan dipimpin oleh Ibu Ketua PKK. Setelah itu baru laporan dri seksi-seksi, dalam pembahasan tentang seksi-seksi ini tetap

commit to user

dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris.” (Wawancara dengan Ibu Yantono, tanggal 25 Mei 2007)

“Pertemuan dibuka dan dipimpin oleh Ibu Ketua PKK. Informasi-informasi disampaikan oleh Ibu Ketua, dalam setiap pertemuan posisi Ketua sebagai figure sentral. Akibatnya kalau Ibu Ketua berhalangan hadir, pertemuan menjadi cepat selesai.” (Wawancara dengan Ibu Yani, tanggal 27 Mei 2007)

“PKK di RT saya pertemuan dipimpin langsung oleh Ibu Ketua PKK, beliau menyampaikan informasi-informasi dari PKK tingkat RW.” (Wawancara dengan Ibu Mulyoto, tanggal 28 Mei 2007)

“Dalam pertemuan PKK di RW selalu ada informasi-informasi dari PKK Desa. Informasi yang diterima langsung dari PKK Desa. Jarang sekali atau hampir tidak pernah informasi itu disampai lewat surat, kecuali table-table yang harus diisi untuk laporan.” (Wawancara dengan Ibu Rujito, tanggal 30 Mei 2007)

“Sebagai kader PKK saya selalu mendatangi pertemuan-pertemuan di PKK Desa. Dalam pertemuan itu saya mendapatkan informasi-informasi dari Ketua PKK Desa. Informasi tersebut saya sampaikan dalam pertemuan PKK di RT ketika ada pertemuan PKK RT.” (wawancara dengan Ibu Muryadi, tanggal 5 Juni 2007)

Pesan yang disampaikan secara langsung merupakan suatu dialog langsung antara pembawa pesan dengan penerima pesan. Dalam dialog sangat mungkin terjadi penjelasan-penjelasan. Dalam dialog tersebut peran pembawa pesan menjadi sangat penting, karena pesan yang disampaikan harus dipahami secara benar. Sehingga pesan yang disampaikan dan diterima oleh anggota sama dengan maksud pesan yang disampaikan oleh pembawa pesan. Pesan yang disampaikan secara langsung akan meminimalkan adanya distorsi pesan, karena perbedaan-perbedaan pandangan maupun ketidakjelasan informasi segera dapat diatasi.

- Pesan disampaikan melalui media

Pesan tidak selalu disampaikan secara langsung, tetapi adakalanya pesan itu disampaikan melalui media, lebih-lebih dalam organisasi besar seperti PKK. Pesan

commit to user

dapat disampaikan lewat media tertentu, ini terlihat dalam wawancara sebagai berikut

:

“Setiap ada instruksi, informasi-informasi dari PKK Kabupaten akan kami teruskan kepada PKK Desa, baik itu lewat surat, atau surat itu kami fotocopy, atau lewat pertemuan-pertemuan kader PKK.” (wawancara dengan PKK Kecamatan Jaten, tanggal 21 Mei 2007)

“informasi yang kami terima dari PKK Kecamatan selalu kami sampaikan kepada PKK RW, ketika pertemuan PKK Desa. Kalau kami terima dalam bentuk surat, ya kami fotocopy, kalau lesan ya lesan. Itu tergantung pada bagaimana saya menerima informasi tersebut” (wawancara dengan Ibu Tutik Pingad, tanggal 7 Juni 2007)

“Dalam pertemuan PKK Desa itu kami dapat informasi dari pengurus PKK desa. Pengurus atau Kader PKK Desa dapat informasi dari PKK Kecamatan. Lha saya sebagai pengurus PKK RW dapat informasi dari PKK Desa, ya lalu saya berikan informasi itu ke PKK RW ketika ada pertemuan. Bentuknya ya mungkin lesan, tapi juga tertulis. Tinggal bagaimana saya memperoleh informasi itu”. (wawancara dengan Ibu Muryadi, tanggal 5 Juni 2007)

“Pertemuan PKK Desa itu kan setiap bulan, maka sebagai ketua PKK RW saya menugaskan pengurus PKK RT yang datang di PKK Desa secara bergantian. Informasi yang diterima oleh pengurus PKK RT itu disampaikan pada waktu pertemuan PKK RW. Kalau bentuk penyampaiannya ya sering lesan, sering tertulis. Itu tergantung pada informasinya”. (wawancara dengan Ibu Rujito, tanggal 30 Mei 2007)

Penyampaian pesan dapat juga disampaikan melalui media surat pemilihan media ini sangat bergantung pada pesan yang harus disampaikan. Pesan yang disampaikan melalui media, mempunyai kendala yaitu ketidak pahaman terhadap pesan yang seringkali tidak segera teratasi. Perlu waktu tersendiri untuk mencari pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh pengurus PKK. Akibatnya penyampaian pesan tidak segera dipahami oleh anggota, dan distorsi pesan sangat mungkin terjadi.

5. Komunikasikan

Anggota Komunikasikan dalam organisasi PKK adalah para anggota dalam setiap jenjang, anggota PKK di tingkat RT adalah ibu-ibu yang ada di RT tertentu. Pengurus PKK RT akan menjadi komunikasikan dalam PKK tingkat RW, sehingga setiap pengurus PKK RT akan berperan sebagai komunikasikan di tingkat RW dan berperan sebagai komunikator di tingkat RT. Demikian juga pengurus di tingkat RW akan berperan sebagai komunikasikan di tingkat Desa dan berperan sebagai komunikator di tingkat RW. Ini terlihat dalam informasi yang disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“Ketika suami saya menjabat Lurah, saya menjadi ketua PKK di kalurahan. Saya mondar-mandir ke kecamatan rapat ini, itu, dan kegiatan PKK yang lain. Tugas saya ya “nyadhong dawuh” dari PKK kecamatan untuk disebar-luaskan ke RW-RW. Selanjutnya RW yang meneruskan ke RT-RT” (wawancara dengan Ibu Muryadi, tanggal 5 Juni 2007)

“Informasi yang kami terima dari PKK kabupaten, kami teruskan ke kalurahan-kalurahan baik itu lewat surat maupun secara lesan pada waktu pertemuan PKK kecamatan. Adakalanya surat dari PKK kabupaten itu kami fotocopy dan kami sebar-luaskan ke kalurahan, tapi sering juga informasi itu dari PKK kabupaten kami ketik dan sebar-luaskan ke kalurahan”. (wawancara dengan PKK Kecamatan Jaten, tanggal 21 Mei 2007)

“Apa yang kami terima dari PKK kecamatan, selalu kami sampaikan pada pengurus PKK RW ketika ada pertemuan PKK di desa. Apapun yang kami terima, kami sebar-luaskan ke PKK RW. Selanjutnya PKK RW yang akan meneruskan ke PKK RT, dan PKK RT yang meneruskan informasi itu ke anggota. Dari dulu juga begitu, dan saya kira belum ada perubahan” (wawancara dengan Ibu Tutik Pingad, tanggal 7 Juni 2007)

Dari wawancara tersebut, jelas nampak bahwa pengurus PKK RT akan berperan sebagai komunikator ketika berada dalam pertemuan di PKK RT, tetapi peran itu akan berubah ketika ada di tingkat RW. Demikian seterusnya peran sebagai komunikator akan berubah menjadi komunikasikan ketika berada di tingkat yang ada di atasnya.

6. Efek

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang akan memberikan daya pada pihak yang diberdayakan. Proses menunjukkan adanya serangkaian kegiatan yang bersifat terus menerus, kronologis, sistematis, sehingga akan memberikan efek pada pihak lain untuk mengubah pola atau tatacara kehidupan menuju pada tatacara yang lebih baik. Demikian juga dengan PKK, dengan gerakan pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Prinsip yang dipakai dalam gerakan PKK adalah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (Hasil Rakernas VI PKK tahun 2005).

Gerakan pemberdayaan tidak menyentuh sampai ke lapisan bawah di RT-RT karena kegiatan yang ada di RT hanya berkisar pada penyampaian informasi dan kegiatan arisan. Pemberdayaan yang dipersepsikan oleh oleh Tim Penggerak PKK Pusat sebagai segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, maju dan mandiri (Keputusan RAKERNAS VI PKK Tahun 2005). Melihat pengertian pemberdayaan diartikan sebagai bimbingan dan pembinaan, maka perubahan nama dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tidak membawa perubahan secara nyata. PKK hanya berada pada upaya bimbingan dan pembinaan, tidak ada suatu terobosan baru dalam memberdayakan anggota.

Perjalanan suatu organisasi yang panjang tentu saja akan mengalami perubahan-perubahan, baik itu perubahan dalam struktur, maupun perubahan dalam visi dan misinya. Demikian juga dengan PKK, telah mengalami banyak perubahan. Ada 2 (dua) hal penting yang perlu diketahui sehubungan dengan perubahan dalam PKK,

commit to user

yang pertama perubahan dalam kepengurusan PKK dan kedua dalam hal keanggotaan PKK. Perubahan-perubahan itu tentu saja harus diketahui oleh anggota dan pengurus di tingkat RW/RT, karena perubahan itu juga menyangkut visi dan misinya. Perubahan harus dikomunikasikan kepada anggota, sehingga ada kesamaan persepsi antara pengurus maupun anggota tentang perubahan.

- **Persepsi anggota tentang perubahan**

Suatu organisasi dalam masyarakat akan memenuhi kebutuhan para anggotanya. PKK yang semula sebagai organisasi perempuan yang bertujuan membina anggotanya untuk mencapai kesejahteraan keluarga anggotanya, berubah tujuan menjadi pemberdayaan. Perubahan-perubahan yang ada dalam suatu organisasi merupakan hal yang wajar, karena tuntutan jaman yang sudah berbeda. Perubahan tentu saja akan dikomunikasikan dengan anggotanya melalui media yang telah tersedia. PKK telah mengalami dua kali perubahan besar, yang pertama, perubahan pengurus yang semula mengikuti jenjang kepangkatan suami berubah tidak harus menyesuaikan dengan jenjang kepangkatan suami. Kedua, perubahan itu menyangkut keanggotaan, pada awalnya PKK merupakan suatu organisasi perempuan, kini para suami ikut sebagai anggota PKK. Perubahan ini tidak sepenuhnya dipahami oleh anggota, perlu adanya penjelasan oleh pengurus kepada anggota-anggotanya, sehingga anggota tahu persis seluk beluk organisasi itu. Gambaran perubahan dalam PKK itu dikomunikasikan kepada anggotanya, secara mendalam dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut.

“saya tahu kepanjangan PKK saat ini. Tapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak saya tahu, konsep tentang pemberdayaan itu apa tidak jelas. Pemberdayaan kok 10 program pokok PKK, melencengnya cukup jauh kan, sehingga saya sampai saat ini tidak melihat adanya perubahan dalam PKK.

Tahun 1985 sampai sekarang itu 20 th lebih. Mestinya situasi dan keadaan masyarakat sudah jauh berbeda. Orang lebih kritis dalam berpikir, tidak mudah diatur, dan sebagainya. Perubahan PKK itu mestinya juga ada perubahan dalam struktur organisasinya, bukan hanya ganti sampul saja. Apa yang dijadikan visi dan misinya harus yang jelas dan operasional, bukan hasil pemikiran kaum elit yang disahkan dengan rakernas.” (wawancara dengan Ibu Yantono, tanggal 25 Mei 2007)

“Orang bilang, singkatan PKK itu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Perubahan itu tidak ada artinya sama sekali. Pemberdayaan itu menyangkut suatu aksi, ya boleh pelatihan, atau hal2 yang sejenis, kemudian ada pendampingan. Yang ada sekarang itu 10 program pokok PKK diupayakan supaya dipahami oleh semua anggota.

Mengapa tidak terjadi perubahan dalam PKK

1. Agen perubahan itu sendiri tidak memahami secara pasti apa yang dimaksudkan oleh para pengurus di atas sana itu, sehingga penerapan pemberdayaan tidak menyentuh lapisan bawah.
2. Perubahan itu hanya pada nama saja, tidak pada program
3. Penyebar-luasannya kurang “ (wawancara dengan Ibu Yani, tanggal 27 Mei 2007)

“Pernah dengar tapi nggak pernah tahu perubahannya. Sejak saya belum tinggal di perumahan ini PKK itu sama saja ya gini terus. 17 tahun saya ikut PKK, tapi dari dulu sampai sekarang nggak ada itu perubahan. Dulu ada perubahan ketua PKK tiak harus istri ketua RT, sampai sekarang ketua PKK RT ya bu RT. Sekarang ada perubahan namanya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yang dirembug ya besok pmt posyandu siapa yang menyediakan. Tetap 10 program pokok PKK. Bapak-bapak juga anggota PKK, nanti kalau ada pertemuan anggota nggak nyambung pembicaraannya. Dan perubahan itu belum pernah diungkapkan atau diinformasikan dalam PKK (wawancara dengan Ibu Mulyoto, tanggal 28 Mei 2007)

“ itu yang saya sebut tadi tidak nampak perubahan itu ada di mana, wong sejak anak2 kita masih ikut arisan hingga sekarang sudah pada pacaran, PKK tetap saja nggak ada itu perubahan.” (wawancara dengan Ibu Rujito, tanggal 30 Mei 2007)

“Pernah dengar ada perubahan dalam nama PKK itu menjadi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, tapi nggak tahu apa yang dinamakan dengan pemberdayaan. Ya itu tadi tidak ada penjelasan tentang PKK itu secara detail,

apa yang dimaksud dengan pemberdayaan, lalu bagaimana pemberdayaan itu dilakukan. Tidak ada penjelasan yang betul2 jelas. Ya akhirnya kembali ke yang dulu. Pengertiannya tidak pernah dijelaskan, sehingga kami tidak bisa melakukan apa itu pemberdayaan. Bagi saya ibu2 di RT ini semua sudah berdaya secara ekonomis, dari sudut yang lain saya tidak tahu.” (wawancara dengan Ibu Sukiyato, tanggal 29 Mei 2007)

“ Dari dulu saya tahu ada beberapa kali perubahan tentang arti singkatan PKK, tetapi perubahan itu tidak membawa arti yang nyata dalam anggota. Dari dulu hingga sekarang ya tetap pada 10 program pokok PKK. Saya tahu arti singkatan PKK itu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, tapi apa maksudnya dengan pemberdayaan itu saya tidak tahu. Tidak ada sosialisasi tentang perubahan nama itu.” (wawancara dengan Ibu Muryadi, tanggal 5 Juni 2007)

“ Ya saya tahu, yang dulunya hanya membina, sekarang memberdayakan. Kalau dulu omong saja begini seharusnya, sekarang untuk begini maka saya harus berbuat sesuatu. Pembinaan yang dulu memang diteruskan administrasinya, tetapi sekarang ada ketrampilan yang diberikan. Harapannya dengan ketrampilan itu perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya ikut dalam pencaharian nafkah keluarga. Tetapi ketrampilan yang diberikan hanya ketika kita ada di kabupaten, di bawahnya tidak pernah terjadi adanya ketrampilan. Ini sangat berkaitan dengan pendanaan, setiap kegiatan itu mesti membutuhkan pendanaan. Untuk mengadakan ketrampilan tidak ada dana dari kabupaten, kecuali kalau desa itu menjadi desa binaan.” Wawancara dengan Ibu Tutik Pingad, tanggal 7 Juni 2007)

Informasi yang didapat dari informan, diketahui bahwa perubahan yang ada dalam PKK itu tidak sampai pada tingkat paling bawah. Informan yang menginformasikan bahwa ada ketrampilan di tingkat kabupaten, karena informan sebagai kader dari desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketrampilan yang ada di tingkat kabupaten hanya berupa ceramah, sehingga yang namanya pelatihan ketrampilan tidak lain daripada ceramah tentang suatu ketrampilan. Akibatnya perubahan yang ada dalam PKK tidak dapat dirasakan oleh anggota di tingkat bawah. Pemberdayaan yang diisuekan, hanya menjadi isue di tingkat pusat, yang sekedar memenuhi program yang tak pernah dijalankan.

- **Pemahaman anggota tentang pemberdayaan**

Pemberdayaan menjadi isue penting dalam PKK, karena tujuannya adalah tercapainya kesetaraan antara suami dan isteri dalam kehidupan berkeluarga. Untuk mencapai kesetaraan, perlu adanya perubahan dalam pola pikir dan pola bertindak dalam masyarakat yang menganut budaya patriarkhi. Pemberdayaan itu semestinya dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada bidang ekonomi saja. Perempuan harus diberi peran dalam segala bidang pada kehidupan berkeluarga, peran itu meliputi juga pengambilan keputusan dalam keluarga. Sehingga pemberdayaan itu menuntut keterlibatan isteri dalam semua aspek kehidupan berkeluarga, tetapi pada kenyataannya pemberdayaan itu hanya dilihat sebagai suatu usaha untuk menambah penghasilan keluarga.

Pemahaman tentang arti pemberdayaan dari para informan memberikan penjelasan yang berbeda, tetapi dapat diklasifikasi dalam 3 kategori :

a. Mengangkat yang lemah untuk bisa mandiri

“ Ada pemberdayaan itu ada 2 pihak, yang satu lemah tidak berdaya dan yang lainnya kuat dan mempunyai daya. Pemberdayaan itu yang lemah dibantu supaya dapat berdaya. Persoalannya yang tidak mampu atau yang lemah itu seperti apa, itu yang tidak jelas. Kalau kita memberikan sedekah pada orang minta-minta itu bukan pemberdayaan, tetapi kalau kita mengumpulkan sejumlah uang kita berikan pada orang sebagai bantuan modal usaha itu pemberdayaan. Pemberdayaan yang saya lihat itu banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga agama, misalnya mesjid, gereja.” (wawancara dengan Ibu Mulyoto, tanggal 28 Mei 2007)

“ Pemberdayaan itu bagi saya mengangkat orang yang tidak berdaya, agar dapat berdaya. Pemberdayaan ini dalam hal apa saja dapat dilakukan. Kalau dalam keluarga, misalnya ada keluarga yang kacau, kita bisa membantu dengan menguraikan apa yang menjadi penyebab sebenarnya, sehingga akar permasalahan dapat diketahui.. Pemberdayaan dalam PKK saya pernah dengar, tapi nggak tahu persis apa yang dimaksud dengan pemberdayaan itu.” (Wawancara dengan Ibu Rujito, tanggal 30 Mei 2007)

“ Kalau saya melihat pemberdayaan itu mengangkat orang yang lemah, agar dapat berusaha untuk menghidupi keluarganya, atau menambah penghasilan keluarga. Saya tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan pemberdayaan dalam PKK, mungkin dengan adanya simpan pinjam itu dapat menolong anggota agar dapat mengembangkan usahanya.” (Wawancara dengan Ibu Muryadi tanggal 5 Juni 2007)

“ Bagi saya pemberdayaan itu mengupayakan mereka yang lemah agar dapat mampu untuk mandiri. Misalnya saja ada anggota yang masih memungkinkan untuk bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan, dengan kita minta untuk membantu pekerjaan kita, lalu kita mengasih imbalan. Atau kalau di RT itu banyak yang nganggur, lalu ada pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan, kemudian mereka yang ikut dalam pelatihan itu bisa menggunakan sebagai usaha kecil, itu yang namanya pemberdayaan.” (Wawancara dengan Ibu Sukiyato, tanggal 29 Mei 2007)

“ Pemberdayaan itu usaha untuk meningkatkan kemampuan agar orang lebih dapat mandiri. Dalam PKK juga demikian, PKK berusaha untuk memberikan ketrampilan pada anggotanya agar dapat atau mampu untuk menyumbang penghasilan keluarga.” (Wawancara dengan Ibu Tutik Pingad, tanggal 7 Juni 2007)

Hasil wawancara itu menunjukkan pemberdayaan itu sebagai mengentaskan orang yang dari tidak mempunyai pekerjaan menjadi orang yang mempunyai pekerjaan, sehingga orang berdaya. Pemberian ketrampilan merupakan suatu usaha yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga, sehingga keluarga itu menjadi berdaya.

b. memberikan pekerjaan supaya mendapat imbalan

” Bagi saya pemberdayaan itu mengangkat seseorang dari suatu keadaan ke suatu keadaan yang lebih baik. Sebagai contoh kalau di RT ini ada satu keluarga yang kurang mampu, kita memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya agar dia mendapatkan imbalan, sehingga dia berdaya. Sehingga konsep saya tentang pemberdayaan itu adalah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga dia dapat menghasilkan barang/jasa.” (Wawancara dengan Ibu Yantono, tanggal 25 Mei 2007)

Pemberdayaan dalam hal ini diartikan membantu orang agar dengan kemampuan yang dimiliki orang dapat menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Informan melihat bantuan itu sebagai modal usaha untuk melanjutkan atau mengembangkan modal itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Mesin jahit dilihat sebagai modal untuk mengembangkan usaha jasa, yang berguna bagi orang lain.

c. memberikan pekerjaan dan pendampingan

“Menolong orang tetapi tidak langsung memberikan uang, tetapi lebih pada pemberian pekerjaan agar orang yang tidak berdaya itu bisa mandiri. Contohnya karyawan saya tidak selalu saya tuntun, tetapi saya arahkan dan saya suruh mengembangkan sendiri. Garis besarnya saya berikan, pengembangannya saya dampingi.. Pemberdayaan itu mengandung suatu pendampingan. Penjualan yang saya lakukan itu saya tambah dengan pendampingan, sehingga petani atau pengguna pupuk saya dapat menghasilkan produk yang optimal.” (Wawancara dengan Ibu Yani,tanggal 27 Mei 2007)

Informan menjelaskan bahwa memberikan pekerjaan saja tidak cukup, ada pengarahan dan pendampingan sehingga orang yang dibantu dapat mengembangkan diri. Penjualan tidak hanya sekedar lakunya barang, tetapi bagaimana orang menggunakan barang dengan semestinya sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Informasi-informasi dari para informan itu menunjukkan bahwa pemahaman informan tentang pemberdayaan hanya sebatas pada usaha peningkatan pendapatan keluarga, tidak mengartikan pemberdayaan itu sebagai peningkatan peran perempuan dalam kehidupan berkeluarga.

1. Tanggapan laki-laki terhadap perubahan dalam PKK

Pemberdayaan diterapkan dalam PKK dengan harapan akan terjadi suatu pemahaman bersama antara suami dan isteri tentang kesejahteraan keluarga, sehingga

akan tercapai adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah. Ini dikarenakan budaya patriarki yang telah mengakar dengan sangat kuat, sehingga sulit untuk diubah. Laki-laki telah menikmati posisi sebagai kepala rumah tangga, mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya. Sementara perempuan sebagai subordinat harus menerima keadaan yang telah digariskan untuknya. Oleh karena itu dalam memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, perlu adanya kerelaan laki-laki untuk berbagi kekuasaan dalam mengatur rumah tangganya. Bagaimana laki-laki menanggapi perjuangan perempuan untuk memperoleh kesetaraan dapat dilihat dari penuturan informan sebagai berikut :

“Kalau PKK sekarang mengangkat issue kesetaraan gender, bagi saya sudah telat. Kesetaraan itu harusnya sudah diangkat sepuluh tahun yang lalu atau bahkan lebih. Mengapa ? Masyarakat kita itu sudah berubah, tadinya kita tinggal di lingkungan keluarga besar segala urusan keluarga dapat dibantu dengan keluarga besar. Sekarang kita hidup dalam keluarga batih, jauh dari keluarga besar, praktis semua urusan keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Bentuk tanggung jawab ini yang harus dibicarakan bersama antara suami dan istri, sehingga tidak terjadi dominasi antara yang satu dengan yang lain. Untuk itu suami-istri membuat kesepakatan bersama dalam pembagian pekerjaan dalam rumah tangga, itulah kesetaraan. Maka bentuk kesetaraan dalam masing-masing keluarga akan berbeda satu dengan yang lain. Kalau memang istri lebih memilih pekerjaan dalam rumah, sementara suami bekerja di luar rumah itu juga kesetaraan. Pokoknya tidak ada dominasi antara yang satu dengan yang lain..

Ketika istri saya mengatakan mau studi lanjut, saya mendukung keinginan dia. Istri memilih studi lanjut di luar kota, saya persilahkan. Dia saya minta untuk kost dan konsentrasi studi, saya siap untuk menjadi bapak dan ibu rumah tangga. Dan benar itu terjadi, pagi-pagi saya ngantar anak sekolah mampir belanja di pasar. Pulang, lalu siap-siap ke kantor. Pulang dari kantor jemput anak-anak, pulang baru masak. Pembantu yang ada “pocokan” hanya nyuci dan setrika. Sore hari anak-anak yang tidak ada kegiatan ikut nyapu dan ngepel rumah. Lepas mahgrib, saya mendampingi anak untuk belajar sekaligus mempersiapkan bahan untuk memberi kuliah. Di situ saya tidak merasa

commit to user

direndahkan karena harus ke dapur, sebaliknya istri tidak merasa ditinggikan karena sedang studi lanjut.

Bagi anak-anak sendiri, mereka merasa ada tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mereka tahu akan tugas mereka, dan saling bantu. Anak-anak melihat pekerjaan membersihkan rumah bukan suatu pekerjaan yang rendah. Mereka merasakan bersih itu nyaman dan bersih itu harus diupayakan.” (wawancara dengan Bp Yantono, tanggal 10 Juli 2007)

“Saya pikir kesetaraan dalam PKK itu hanya pemanis saja, tidak ada kegiatan yang memperjuangkan kesetaraan. Pernahkah PKK secara khusus membahas kesetaraan? Sejauh saya amati itu belum pernah terjadi. Kesetaraan itu bagi saya, kesepakatan suami-istri dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangganya. Untuk itu kesetaraan gender itu harus dimulai dari rumah, bukan dari PKK. Paling PKK itu memberikan pengertian-pengertian tentang kesetaraan, tapi inipun tidak dilakukan.

Saya kerja wiraswasta dan istri karyawan swasta. Tentu saja ini sangat berlainan situasinya dengan saudara-saudara yang PNS. Jalannya kehidupan rumah tangga tergantung pada usaha saya dan perusahaan tempat istri saya kerja. Makanya saya harus menjaga dan kreatif dalam berusaha, mencermati situasi pasar yang ada. Istri sering bantu dalam usaha saya sampai larut malam. Ini tidak saya minta, tapi kemauan dia sendiri. Urusan rumah tangga menjadi urusan istri, walaupun pengerjaannya dilakukan pembantu. Kesetaraan itu saya terapkan dengan cara mengizinkan istri untuk ikut dalam pencaharian nafkah bagi keluarga. Begitu juga dengan pendidikan anak, saya diskusikan dengan istri, tentang sekolah mana yang akan dipilih untuk anak-anak. Dalam hal-hal tertentu istri saya lebih jeli. Contohnya ketika kami memutuskan untuk membeli mobil baru, istri saya cukup cermat dalam menghitung biaya operasional mobil yang lama, sehingga untuk penghematan harus ganti mobil dengan yang baru” (wawancara dengan Bp Yani, tanggal 11 Juli 2007).

“Bagi saya kesetaraan itu jangan dikenalkan pada salah satu pihak saja, misal pada perempuan. Padahal yang diisuekan sebagai kesetaraan itu antara laki-laki dan perempuan. Bagi saya ya isue kesetaraan itu dikenalkan pada kedua belah pihak baik itu laki-laki dan perempuan. tapi isue kesetaraan yang ada dalam PKK itu kan hanya wawasan atau wacana elit yang dibuat atau dipaksakan agar PKK nampak dapat mengikuti arus perubahan. Sebenarnya kesetaraan itu sudah ada sebelum PKK itu mengangkat isue kesetaraan.

Saya mengamati kesetaraan itu begini : masyarakat kita sebenarnya ada dalam masa transisi. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang seusia kita ini, kita mulai lepas dari keluarga besar tetapi tidak bisa lepas 100 pct. Kehidupan kita sehari-hari itu dengan keluarga inti, sehingga segala urusan rumah tangga mulai dari membersihkan rumah, mengasuh anak menjadi tanggung jawab suami dan istri. Maka suami-istri mau tidak mau kerjasama dalam

commit to user

penyelenggaraan rumah tangga. Apalagi kalau keluarga itu pas-pasan, tidak dapat menggaji pembantu rumah tangga.. Sementara itu istri juga terlibat dalam pencaharian nafkah di luar rumah, maka pekerjaan rumah harus dibagi antara suami dan istri. Memang pembagian itu tidak dapat separo persis, karena tidak semua orang dapat memasak misalnya, sehingga istri bagian masak sedang suami ikut mencuci pakaian dlsb. Pada kenyataannya yang melakukan pekerjaan rumah masih berada dalam tangan istri, istri kelihatannya masih sulit untuk meninggalkan dapur.” (wawancara dengan Bp Mulyoto, tanggal 14 Juli 2007)

“Kesetaraan yang model apa yang dikehendaki oleh PKK ? Bagi saya ya nggak bisa PKK mau membuat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan perempuan dengan laki-laki itu sudah digariskan sejak dulu. Rumah itu dikelola oleh perempuan, laki-laki kerja di luar rumah cari duit. Laki-laki itu kepala rumah tangga, dah itu saja yang dipegang. Kalau PKK berusaha untuk membuat kesetaraan, ya nggak mungkin to. Itu budaya kita lho. Masak PKK mau memutar adat, ndak bisa menurut saya.

Perempuan itu punya tempat di belakang, laki-laki itu di depan. Itu sudah dikodratkan dari sana yang tidak kita ketahui asalnya. Pokoknya kita tahunya demikian. Urusan cari uang itu bagiannya laki-laki, perempuan tinggal menerima dan membelanjakan itu dalam sebulan. Caranya gimana itu urusan perempuan, yang penting ada makanan untuk keluarga, kopi untuk suami. Semua itu sudah kami pahami sejak menikah dulu, orang tua kita sudah mengajarkan demikian : istri harus bekti pada suaminya. Kita kita turuti saja petuah para sesepuh kita, karena pada kenyataannya mereka berbuat demikian ya baik-baik saja, rukun-rukun saja. Sekarang kalau diterapkan kesetaraan, di masyarakat kita malah banyak yang selingkuh dengan teman sekantornya. Apa yang sudah baik dilakukan oleh para sesepuh kita teruskan, yang kurang bisa kita perbaiki.” (wawancara dengan Bp Muryadi, tanggal 15 Juli 2007)

Informasi yang diberikan oleh para informan tersebut memberikan penjelasan bahwa kesetaraan itu masih dipahami secara beragam, tidak ada satu kesepakatan bersama dalam masyarakat tentang kesetaraan. Pemahaman dan penerimaan informan terhadap kesetaraan dapat dikategorikan dalam 3 kategori yaitu :

- a. menerima adanya kesetaraan : memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aktualisasi diri.

- b. menerima dengan setengah hati : perempuan diberi kesempatan, tetapi batas-batasnya. Dalam hal ini perempuan boleh ikut dalam kegiatan di luar rumah, tetapi urusan rumah tangga tetap menjadi bagiannya.
- c. mempertahankan budaya patriarki : tetap mempertahankan budaya patriarki, di mana isteri harus tunduk pada suami dan dominasi pada laki-laki.

B. Pembahasan

Dalam setiap system social, komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga masuk dalam tujuh proses utama dalam system social. Dengan komunikasi individu dapat mengutarakan pendapat, gagasan, ide-ide serta perasaannya. Demikian juga sebaliknya, dengan komunikasi, individu dapat menerima pendapat, gagasan, ide-ide serta perasaan dari individu lain. Organisasi dapat juga dilihat sebagai suatu system social, karena organisasi merupakan suatu kelompok individu yang mempunyai suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dalam organisasi ada bagian-bagian, dimana tiap bagian menjalankan fungsi tertentu. Bagian-bagian tersebut secara bersama berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi, sehingga dalam setiap organisasi sangat diperlukan adanya komunikasi. Komunikasi dalam organisasi memegang peran yang amat penting, karena dengan komunikasi ide-ide/pikiran dapat disampaikan guna mencapai tujuan bersama. Dalam pembahasan ini beberapa pendekatan akan digunakan yaitu :

1. Komunikasi dalam PKK

Dalam bukunya Ilmu Komunikasi suatu pengantar, Deddy Mulyana (2001;62) mengutip beberapa definisi komunikasi sebagai berikut :

commit to user

Gerald R. Miller :

Komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.

Everett M. Rogers

Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.

Harold Lasswell

(cara terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut) Who Says What in Which Channel To Whom With What Effect

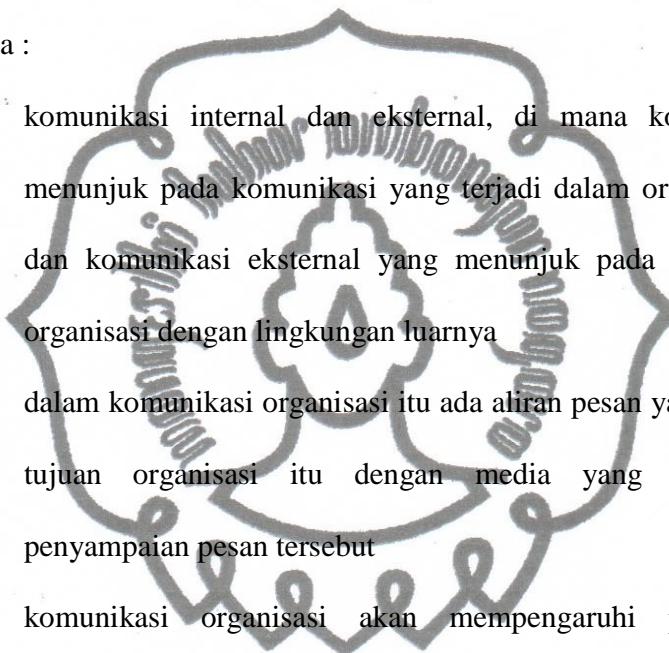
Definisi-definisi tentang komunikasi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa komunikasi merupakan suatu proses adanya pertukaran pesan/ide antara pengirim dan penerima pesan untuk merubah tingkah laku. Secara garis besar, dalam komunikasi dikenal 2 (dua) bentuk komunikasi yaitu : komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal terjadi ketika orang berpikir sebelum melakukan sesuatu tindakan atau memutuskan sesuatu. Pemikiran itu hanya diketahui dan dikonsumsi oleh individu itu sendiri. Sedangkan komunikasi interpersonal terjadi ketika seseorang mengemukakan buah pikirannya kepada orang lain.

Dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya komunikasi organisasi yang mampu mengembangkan sikap anggota untuk merubah pola pikir dan pola perilakunya sehingga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Redding dan Sanborn dalam Arni Muhammad (2005;65) mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Sedangkan Zelko dan Dance (Arni Muhammad, 2005; 66) mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling

commit to user

bergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Catrin Johansson menyatakan a wide definition of organizational communication is used, including internal, external, informal and formal communication with processes ranging from intraindividual to mass mediated communication (2007,93).

Pengertian-pengertian komunikasi organisasi itu menunjukkan bahwa dalam organisasi ada :

- 
- a. komunikasi internal dan eksternal, di mana komunikasi internal menunjuk pada komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri dan komunikasi eksternal yang menunjuk pada komunikasi antara organisasi dengan lingkungan luarnya
 - b. dalam komunikasi organisasi itu ada aliran pesan yang mengarah pada tujuan organisasi itu dengan media yang digunakan dalam penyampaian pesan tersebut
 - c. komunikasi organisasi akan mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya.

Oleh karena itu setiap organisasi tidak dapat meninggalkan komunikasi organisasi, dengan komunikasi organisasi semua elemen dalam organisasi terintegrasi ke dalam di mana integrasi ini akan memperkuat organisasi untuk menjaga keberlangsungan dalam mencapai tujuan. Komunikasi organisasi bukan hanya sekadar alat untuk mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu, komunikasi organisasi merupakan suatu proses yang memunculkan adanya suatu makna yang dipahami secara bersama dan menjadi pola pikir dan pola perilaku yang sama dari anggota organisasi tersebut. Tanpa adanya pemaknaan akan tujuan organisasi, maka tujuan organisasi hanya merupakan

commit to user

slogan yang tidak berarti sama sekali. Arti tentang PKK sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk yang akan dituju.mencapai adanya kesetaraan gender dan keadilan gender tidak sepenuhnya dipahami oleh anggota, sehingga pemahaman tentang PKK itu menjadi kabur.

Komunikasi organisasi merupakan suatu proses internalisasi tujuan yang hendak dicapai melalui langkah-langkah tertentu dari setiap anggota, sehingga perlu adanya suatu iklim komunikasi yang kondusif dalam organisasi guna menunjang adanya komunikasi organisasi. Iklim organisasi akan tercapai, ketika pengurus dan anggota saling berbagi pikiran, ide, tujuan. Keterbukaan dan penerimaan ide, pikiran dari anggota, diberi tempat tersendiri, sehingga aspirasi dari bawah dapat diakomodir. Terputusnya komunikasi dari bawah ke atas sebenarnya merupakan malapetaka dari organisasi, apalagi PKK sebagai suatu organisasi pemberdayaan.

Organisasi menurut Schein (Arni Muhammad, 2005 :23) adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Sedangkan Kochler (dalam Arni Muhammad,2005: 24) mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Kedua pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam organisasi terdapat suatu kegiatan yang dikoordinasi, dalam mengkoordinasi suatu kegiatan tidak terlepas dari adanya komunikasi dalam organisasi tersebut. Dengan komunikasi setiap anggota organisai itu akan mengetahui dengan jelas arah yang akan dituju, dengan cara mana yang dipilih untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi PKK, komunikasi organisasi

commit to user

nampak dalam komunikasi antara ketua dan anggota. Ketua PKK RT menyampaikan pesan yang diterima ketika ada pertemuan di tingkat RW. Demikian juga Ketua PKK RW akan menyampaikan pesan yang diterimanya pada waktu ada pertemuan PKK Desa. Pesan bergulir dari atas ke bawah, terus sampai ke anggota. Dalam hal ini mengandaikan bahwa dalam organisasi tersebut ada iklim komunikasi dan iklim organisasi yang sejuk sehingga membuat anggota merasa terlibat dalam kegiatan organisasi tersebut. Iklim organisasi dan iklim komunikasi memungkinkan anggota untuk menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan untuk keberlangsungan organisasi. Dalam organisasi PKK tidak ditemukan adanya iklim komunikasi dan iklim organisasi yang sejuk. Balik dari anggota tingkat RT membutuhkan waktu yang lama bila harus sampai ke tingkat RW. Ini membuktikan bahwa iklim organisasi sangat kaku, sehingga segala sesuatu harus dibicarakan secara formal dalam pertemuan yang formal juga.

Suasana seringkali digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan alam atau iklim tertentu, demikian juga dengan komunikasi dalam organisasi perlu adanya iklim yang sejuk. Dengan iklim komunikasi yang ada dalam suatu organisasi itu, orang atau anggota organisasi akan menunjukkan adanya perilaku yang sama dalam menanggapi iklim yang sama. Dalam iklim yang panas orang tidak akan memakai jaket di ruangan, tetapi sebaliknya dalam iklim yang dingin orang akan mengenakan jaket di ruangan. Demikian juga dengan iklim komunikasi yang sejuk dalam organisasi, anggota akan saling bertegur sapa dengan ramah dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Iklim komunikasi dalam organisasi akan membentuk perilaku anggota

dalam organisasi. Redding (Arni Muhammad, 2005:85) mengemukakan lima dimensi penting dari iklim komunikasi :

- a. supportiveness
- b. partisipasi membuat keputusan
- c. kepercayaan
- d. keterbukaan dan keterusterangan
- e. tujuan kinerja yang tinggi

Kelima dimensi itu penting karena supportiveness akan melihat bagaimana hubungan antara anggota dengan pengurus atau atasan, sehingga anggota merasa sebagai bagian dari organisasi. Hubungan yang harmonis antara atasan dengan anggota menumbuhkan rasa kekerabatan yang tinggi, sehingga loyal terhadap organisasi. Partisipasi membuat keputusan merupakan bentuk keterlibatan anggota pada organisasi, sehingga anggota mempunyai rasa memiliki organisasi. Dengan keterlibatan dan rasa memiliki organisasi anggota akan mempertahankan kelangsungan hidup organisasi, serta menjaga organisasi itu dari ancaman baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar organisasi. Kepercayaan yang diberikan kepada anggota akan mendorong anggota untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan organisasi yang telah dicanangkan merupakan tujuan bersama, sehingga perlu adanya kepercayaan pada anggota untuk secara bersama dan bertanggung jawab mencapai tujuan. Kepercayaan akan memberi semangat pada anggota untuk giat dalam mencapai tujuan.

commit to user

Keterbukaan dan keterus-terangan dalam organisasi akan membuat anggota merasa nyaman untuk berada dalam organisasi, karena anggota akan mengetahui secara jelas bagaimana posisi organisasi itu secara nyata, baik kesulitan yang dihadapi maupun keberhasilan yang telah dicapai. Tujuan kinerja yang tinggi, organisasi mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, dan dipahami oleh semua anggota. Pencapaian tujuan dengan sendirinya membutuhkan dukungan, partisipasi dan keterlibatan secara aktif dari anggota. Pengurus suatu organisasi akan mengkoordinasikan dan memotivasi anggota guna mencapai tujuan bersama. Dalam pencapaian tujuan diperlukan kinerja yang tinggi baik oleh pengurus maupun anggota. Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya penerapan kelima demensi tersebut, sehingga anggota menjadi pasif tidak tahu apa yang menjadi tujuan organisasi PKK. Akibatnya perubahan dalam organisasi tidak dipahami secara benar, tidak ada partisipasi dalam kehidupan organisasi.

Kelima demensi itu dalam penerapannya membutuhkan iklim komunikasi yang sejuk, hubungan antara pengurus dan anggota yang harmonis, sehingga distorsi pesan dapat diminimalkan. Iklim komunikasi akan memperpendek jurang pemisah antara anggota dan pengurus organisasi, sehingga memungkinkan adanya komunikasi antara anggota dan pengurus. Hubungan timbal balik antara anggota dan pengurus akan dapat tercapai apabila ada iklim organisasi yang memungkinkan adanya kebersamaan dalam rasa memiliki organisasi.

Suatu kelompok orang akan berbeda dengan kelompok lainnya, perbedaan itu tampak pada tingkat keakraban yang ada. Keakraban itu menunjukkan adanya suasana atau iklim yang hangat dalam kelompok tersebut. Begitu juga dengan

commit to user

organisasi, ada iklim organisasi yang mendukung anggota untuk saling berinteraksi, saling mengisi, guna mencapai tujuan yang menjadi cita-cita organisasi.

Iklim organisasi dapat terlihat dari hubungan antara pengurus organisasi dengan anggota-anggota. Hubungan yang akrab akan menumbuhkan adanya saling keterbukaan dalam menghadapi situasi sulit yang dialami oleh suatu organisasi. Dengan keterbukaan dalam melibatkan anggota dan didukung oleh iklim organisasi yang hangat, partisipasi anggota untuk terlibat dalam masalah-masalah yang dihadapi organisasi sangat dimungkinkan. Keterlibatan anggota dalam pemecahan masalah organisasi akan memudahkan pengurus untuk mengkoordinasikan strategi-strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati. Dalam organisasi yang besar di mana pengurus ada di tingkat pusat sedangkan anggota ada tersebar di daerah-daerah, maka akan sangat sulit adanya komunikasi langsung antara pengurus pusat dengan anggota di daerah. Untuk itu perlu dibangun center-center yang merupakan kepanjangan-tangan dari pengurus pusat, sehingga komunikasi dapat tetap terjaga. Center inilah yang mengelola iklim organisasi dengan anggota di bawahnya, dan berfungsi mengalirkan pesan dari pengurus pusat ke anggota-anggota. Center sebagai pen jembatan atau penyelia harus mampu mengetahui kekuatan-kekuatan maupun potensi-potensi anggota yang berada di bawahnya, serta mampu mengolah pesan dari pengurus pusat.

Dalam komunikasi organisasi dikenal pula adanya komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu, misalnya komunikasi antara pengurus dan anggota. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi dengan

commit to user

organisasi lain, atau dengan lingkungannya. Hal ini dikemukakan oleh Eunju Rho : “ According to the direction of information flow, communication has been trichotomized into downward, upward, and horizontal directions, which depends upon who initiated the communication and who received it. The boss-subordinate transaction through downward or upward communication is probably the most common communicative situation within a work organization.” Selanjutnya dikatakan bahwa : “ downward communication means the flow of information from superiors to subordinates and it is a dominant channel in accordance with formal communication networks” Katz dan Kahn, 1966 (dalam Eunju Rho,2009) mengidentifikasi “five types of downward communication, including job instruction, job rationale, procedures and practices, feedback and indoctrination of goals.” Garnett,1992 (dalam Eunju Rho,2009) menyatakan :“ The second type of communication within an organization is upward communication, which flows from subordinates to superiors. Upward communication is a channel to know “how work is processing, what problems and opportunities subordinates see, what ideas subordinates have for improving performance, what intelligence subordinates gather about what clients and other organization are doing and what subordinates feel about the agency, their superior, and their jobs.” Sedangkan komunikasi horizontal dikemukakan oleh Miller (1999) sebagai berikut :” Horizontal communication indicates the lateral exchange of information, which flows in accordance with the functional principle among people on the same level within an organization. Upward and horizontal communication are emphasized for employee satisfaction” (dalam Eunju Rho, 2009)

Kehidupan suatu organisasi tidak terlepas dari organisasi-organisasi lain, dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi dengan organisasi lain dan lingkungan social di mana organisasi itu berada, Eunju Rho mengatakan :”external communication processes link multiple organization and connect the organization to its environment.” (2009 :8) Komunikasi dengan organisasi lain bertujuan untuk mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan, sedangkan komunikasi dengan lingkungan bertujuan agar lingkungan dapat menerima kehadiran organisasi dan ada keselarasan antara tujuan organisasi dengan kehidupan masyarakat.

Dalam komunikasi organisasi ada dinamika proses dalam penyebaran informasi yang dapat terjadi pada waktu yang tidak tertentu, sehingga perlu adanya pola yang teratur dimana pesan itu disampaikan. Proses itulah yang disebut dengan pola aliran informasi dalam organisasi.

Ada 2 (dua) pola dalam aliran informasi dalam organisasi, yaitu pola lingkaran dan pola roda.

Kelebihan dari pola roda adalah informasi dapat disampaikan secara :

- Serentak karena informasi yang disampaikan segera dapat diterima oleh pengurus di tingkat bawahnya. Demikian di bawahnya membentuk center baru, informasi dapat dikirimkan ke tingkat di bawahnya, sehingga informasi yang dikirim dapat terjadi secara bersamaan dengan waktu yang hampir bersamaan.
- Tersebar karena informasi dari pusat segera terkirim ke propinsi dan selanjutnya propinsi menyebar-luaskan informasi ke kabupaten-kabupaten.

commit to user

Demikian seterusnya sampai pada tingkat RW/RT, sehingga informasi itu dapat tersebar ke anggota.

- Cepat karena masing-masing center mengkomunikasikan informasi yang diterimanya ke daerah-daerah yang berdekatan. Pusat tidak perlu menjangkau daerah-daerah yang jauh, karena daerah-daerah punya center yang berada di dekatnya.

Arah dan aliran komunikasi dalam organisasi, seringkali juga disebut dengan jaringan komunikasi dalam organisasi menunjukkan adanya aliran informasi, bagaimana informasi itu disampaikan. Dalam hal ini ada 2 (dua) bentuk komunikasi yaitu komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas.

a. komunikasi ke bawah

Komunikasi ke bawah sangat dibutuhkan oleh pengurus di tingkat bawah dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Dalam PKK komunikasi ke bawah ini terjadi melalui tingkatan-tingkatan tertentu, mulai dari Pengurus Daerah Tk I yaitu pengurus ditingkat Pemerintah Propinsi, kemudian ke bawah dengan Pengurus Daerah Tk II yaitu pengurus ditingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan dilanjutkan sampai ke Pengurus Tingkat Kecamatan, dan diteruskan sampai ke Desa dan RW/RT.

Pola penyebaran informasi seperti tersebut di atas tentu saja membawa resiko terjadinya distorsi pesan, sehingga pesan yang disampaikan ke anggota menjadi kabur atau tidak dapat ditangkap maknanya secara jelas. Ini disebabkan karena :

- pengirim berita/pesan

Pengirim pesan mengirimkan pesannya secara garis besar, sehingga perlu adanya penafsiran kembali tentang isi pesan yang disampaikan oleh penerima pesan.

commit to user

Ketidak-jelasan isi pesan ini mengakibatkan adanya ketidak-jelasan pesan yang harus disampaikan kepada pengurus yang ada di bawahnya. Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan isi pesan pesan, maka pesan dari pengurus pusat dicopy dan dikirimkan kepada pengurus di tingkat bawahnya. Terjadilah pesan yang makin tidak jelas, yang harus disampaikan kepada anggota, sehingga anggota tidak dapat mengartikan pesan yang diterimanya.

- penerima berita/pesan

Penerima pesan yang takut akan terjadinya kesalahan atau keterbatasan kemampuan dalam menginterpretasikan pesan yang diterima, akan meneruskan pesan yang diterimanya sebagaimana adanya, dan pengurus di tingkat bawahnya yang diminta untuk menginterpretasikan isi pesan. Ketakutan dan ketidak mampuan dalam menginterpretasikan isi pesan oleh pengurus yang mengakibatkan adanya ketidakberesan dalam menangkap pesa, sehingga ada kesalahan dalam menangkap pesan atau dapat dikatakan ada distorsi pesan. Distorsi pesan ini yang mengakibatkan tujuan organisasi menjadi tidak jelas dan perubahan-perubahan dalam organisasi tidak dapat dipahami bersama oleh anggota organisasi. Akibatnya keputusan-keputusan yang dihasilkan dari rapat-rapat pengurus, rapat-rapat kerja hanya menjadi wacana dari elit organisasi yang tidak dapat diimplementasikan.

b. komunikasi ke atas

Komunikasi dari bawahan kepada atasan sebenarnya sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi, karena atasan akan mempunyai data yang dapat dipakai untuk membuat kebijakan-kebijakan baru bagi organisasi. Pada kenyataannya

komunikasi dari bawahan kepada atasan atau komunikasi ke atas sangat sulit dilakukan karena :

- dari pihak atasan

Atasan jarang sekali menerima keluhan-keluhan dari bawahan, karena apa yang sudah diputuskan dalam rapat pengurus menjadi suatu pedoman yang baku bagi organisasi dan harus dilaksanakan apa adanya. Sehingga keluhan dari bawahan tidak berguna bagi atasan dalam pengembangan organisasi.

- dari pihak bawahan

Bawahan dalam menjalankan kegiatan organisasi sudah mendapatkan petunjuk dari atasannya. Sedangkan petunjuk yang diberikan hanya suatu garis besar secara umum dan tidak mendetail, sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian di lapangan. Bawahan yang selalu menanyakan tugas yang belum jelas diketahui akan dinilai sebagai orang bodoh yang selalu bertanya. Keengganan dinilai sebagai orang bodoh ini menyebabkan komunikasi ke atas sulit dilakukan.

Kedua bentuk komunikasi tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan dan kehidupan organisasi. Atasan dan bawahan saling mengisi kekurangannya sendiri-sendiri dan akan saling melengkapi, sehingga situasi di bawah dan pemikiran pengurus akan sejalan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berikutnya.

Melihat pola informasi dalam organisasi dan arah aliran komunikasi dalam organisasi seharusnya ada suatu kombinasi antara pola informasi dalam organisasi dan arah aliran komunikasi. Pola roda mempunyai kelebihan, tetapi pola ini harus didampingi dengan arah aliran ke bawah. Arah aliran komunikasi ke bawah mempunyai

commit to user

perbedaan di setiap jenjangnya. Pengurus pusat tidak mungkin memberikan informasi yang detail, mungkin berupa konsep-konsep yang harus diterjemahkan lagi oleh center atau penyelia di bawahnya, demikian juga seterusnya, sehingga pesan yang diterima oleh anggota di daerah merupakan pesan yang dapat diterapkan. Dengan kata lain tiap jenjang penyelia mempunyai kewajiban untuk lebih mengoperasionalkan pesan dari tingkat yang ada di atasnya, sehingga mudah ditangkap dan dilaksanakan di tingkat bawahnya.

Komunikasi ke atas dalam penelitian ini sulit terjadi, karena ketika ada persoalan yang ada di tingkat bawah harus dikonsultasikan ke tingkat yang ada di atasnya. Penyampaian persoalan membutuhkan waktu, karena menunggu adanya pertemuan, sehingga persoalan tidak segera tertangani. Akibatnya persoalan dalam posisi menggantung tidak ada penyelesaian, dalam hal ini diperlukan suatu keberanian untuk mengambil keputusan. Ketidakberanian pengurus ini akibat suasana organisasi yang terbentuk sejak awal berdirinya organisasi PKK pada jaman orde baru, dimana komunikasi ke bawah merupakan instruksi yang tidak terbantahkan. Suasana ini dilanggengkan, sehingga segala permasalahan yang ada harus diputuskan pengurus di atasnya.

Dalam suatu organisasi wajar kalau terjadi adanya struktur yang membuat adanya perbedaan dalam posisi seseorang, sehingga ada pengurus dan anggota yang berbeda kedudukannya. Yang dimaksud dengan komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, dalam organisasi yang menjadi komunikator adalah pengurus. Pengurus menyampaikan pesan berupa tujuan, strategi yang harus dijalankan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Kehidupan organisasi tidak terlepas dari

commit to user

lingkungan sekitarnya, bahkan lingkungan mempengaruhi kehidupan maupun adanya perubahan dalam organisasi. Perubahan itu tentu saja harus dikomunikasikan oleh pengurus kepada anggota.

Adapun yang dimaksud dengan komunikan adalah penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dalam suatu organisasi pengurus pusat akan berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan, yaitu pengurus organisasi di bawahnya. Peran komunikan akan berubah menjadi komunikator ketika harus menyampaikan pesan kepada pengurus di level bawahnya. Demikian seterusnya sampai pada tingkat paling bawah. Komunikator dan komunikan dalam organisasi memegang peran yang sangat penting dalam penyampaian pesan, dalam hal ini dituntut kemampuan individu. Dalam organisasi di mana jabatan pengurus menyesuaikan jabatan suami/istri di kantor, akan sangat berpengaruh pada aliran informasi yang akan diterima oleh anggota. Karena seorang istri kepala desa belum tentu memiliki kemampuan yang dipunyai suaminya, hal ini akan mempengaruhi penyampaian pesan yang harus disampaikan kepada anggota.

Pesan yang disampaikan oleh komunikator akan ditangkap oleh komunikan baik secara individual maupun kelompok secara beragam, bergantung pada :

- a. Komunikator, dalam ilmu komunikasi siapa yang bicara mempunyai efek yang sangat penting dalam menyampaikan pesan. Sebagai pembawa pesan akan dinilai oleh khalayak baik dari penguasaan materi yang disampaikan maupun posisi/status komunikator dalam masyarakat. Seorang Bupati akan lebih didengarkan oleh khalayak ketika menyampaikan kebijakan yang

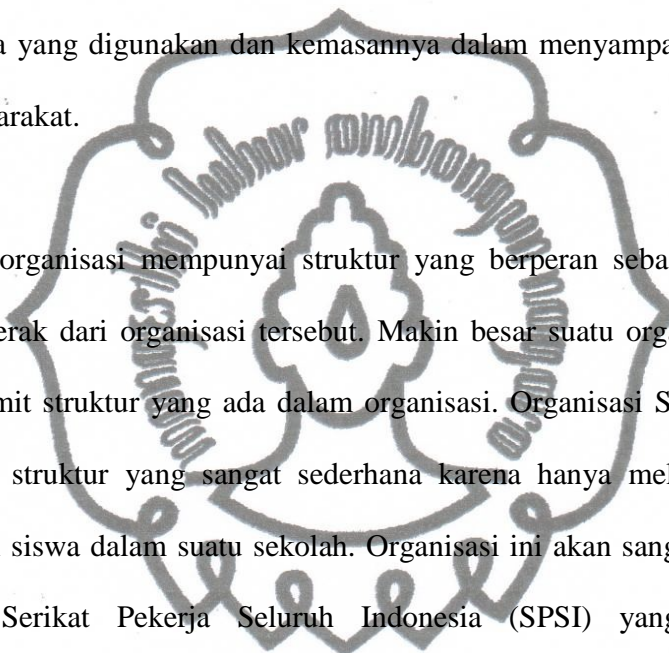
diambilnya, dari pada seorang Kepala Desa menyampaikan kebijakan yang diambil Bupati.

- b. Kemampuan daya tangkap komunikasi sangat berpengaruh terhadap interpretasi isi pesan yang diterima, sehingga sangat berpengaruh pula dalam penerapannya. Kesetaraan yang digembar-gemborkan oleh aktivis perempuan hanya menjadi issue di kalangan tertentu, karena tidak semua khalayak mampu mencerna makna kesetaraan.
- c. Kultur dalam masyarakat akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan perubahan yang disampaikan. Menghapuskan dominasi laki-laki terhadap perempuan bukan suatu hal yang mudah dalam masyarakat dengan budaya patriarki. Kesetaraan yang didengungkan oleh PKK hanya menjadi slogan yang menghiasi kertas kerja.

Oleh karena itu dalam menyampaikan pesan komunikator perlu merencanakan strategi komunikasi yang memperhatikan :

- a. Siapa dan akan menyampaikan apa, seorang tokoh masyarakat akan lebih diterima dalam masyarakat berikut pesan yang disampaikan. Sehingga dalam menyampaikan pesan, pengirim pesan harus jeli dalam memilih orang yang akan menyampaikan pesan.
- b. Khalayak sasaran akan menentukan bahasa mana yang akan dipilih dalam menyampaikan pesan. Dalam menyampaikan pesan di kalangan akademisi akan berbeda ketika pesan itu disampaikan di kalangan kaum nelayan. Penyesuaian bahasa ini akan mempermudah penerimaan pesan.

- c. Media yang digunakan. Dalam era globalisasi ini banyak pilihan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, tetapi tetap harus diingat kemasan pesan yang harus disampaikan. Ketoprak humor akan lebih mudah dicerna oleh masyarakat kelas bawah, sedangkan penggunaan internet akan cepat ditangkap oleh masyarakat kelas atas. Sehingga perlu memperhatikan media yang digunakan dan kemasannya dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.



Setiap organisasi mempunyai struktur yang berperan sebagai pedoman yang mengatur gerak dari organisasi tersebut. Makin besar suatu organisasi, maka akan semakin rumit struktur yang ada dalam organisasi. Organisasi Siswa Intra Sekolah mempunyai struktur yang sangat sederhana karena hanya melayani kepentingan kepentingan siswa dalam suatu sekolah. Organisasi ini akan sangat berbeda dengan organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang mengakomodasi kepentingan para pekerja di seluruh Indonesia. Demikian juga dengan PKK yang mempunyai anggota tersebar di seluruh pelosok tanah air, akan mempunyai struktur yang sangat rumit. Struktur organisasi akan sangat mempengaruhi perilaku anggota, komunikasi antara anggota dengan pengurus, antara pengurus dengan pengurus, antara anggota dengan anggota. Struktur akan memformalkan aliran informasi dalam suatu organisasi, sehingga kearah mana informasi itu harus disampaikan dan oleh siapa.

Struktur organisasi dapat dipandang dengan berbagai cara, sebagai suatu objek empiris, sekumpulan hubungan yang dirundingkan, sebuah system atau suatu

commit to user

pembawa proses social (McPhee, 1985, dalam R Wayne Pace,2006:234). Sedangkan Stephen P Robbins, 2005,217) menyatakan struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Selanjutnya Wayne Pace mengatakan bahwa struktur organisasi menjadi perhatian bagi pekerja dalam organisasi karena akan menunjukkan arah aliran informasi berhubungan langsung dengan bagaimana seharusnya pekerjaan dilakukan dan siapa yang memiliki akses ke dalam informasi serta siapa yang mengendalikan informasi. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik suatu simpulan bahwa aliran informasi dalam organisasi bergantung pada struktur organisasi. Demikian juga dengan PKK mempunyai jaringan yang sangat luas dengan struktur kepemimpinan yang berada di pusat, propinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat RW/RT. Aliran informasi melalui tingkat-tingkat tertentu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke anggota.

Melihat panjangnya aliran informasi dan luasnya jaringan kerja dalam suatu organisasi, maka wajar bila terjadi adanya pembagian kekuasaan dalam organisasi. Organisasi PKK misalnya, akan mempunyai pemimpin yang “berkuasa” pada wilayah wilayah tertentu. Pemimpin itu akan mempunyai bawahan yaitu pemimpin yang berada di tingkat yang lebih rendah. Pemimpin-pemimpin itulah yang menguasai akses informasi. Informasi-informasi dari tingkat pusat ke daerah-daerah tentu saja berbeda persinya. Dari tingkat pusat ke propinsi, kabupaten/kota masih berupa konsep yang harus diterjemahkan lagi. Demikian juga informasi dari kabupaten/kota ke tingkat kecamatan merupakan informasi yang dapat dilakukan, sehingga sampai di tingkat kalurahan/desa merupakan informasi praktis apa yang

commit to user

harus dilakukan oleh anggota. Dengan demikian dibutuhkan suatu pemimpin yang cakap untuk menterjemahkan konsep menjadi kegiatan yang dapat dilakukan.

Pada awalnya PKK mempunyai struktur yang kaku, dimana ketua PKK mengikuti jabatan suami di kantor pemerintahan. Akibatnya seringkali terjadi ketua PKK tidak mampu memimpin PKK di wilayahnya, sehingga organisasi PKK macet dalam kegiatannya. Situasi ini ditangkap, kemudian diadakan suatu perubahan bahwa ketua PKK tidak harus mengikuti jabatan suami. Tetapi karena pada awalnya, dan berjalan cukup lama, bahwa jabatan dalam PKK itu mengikuti jabatan suami maka situasi itu tetap hidup dalam PKK. Akibatnya kehidupan PKK hanya sebatas hanya ada, tanpa ada kegiatan yang dimaksud. Dalam organisasi sebaiknya dipisahkan antara jabatan suami dan istri, pimpinan suatu organisasi yang dibutuhkan adalah kemampuan dan kecakapan seseorang. Campur-aduknya jabatan suami disalah satu instansi dengan jabatan istri dalam organisasi lebih banyak menimbulkan kekakuan dalam komunikasi, sehingga mengakibatkan tersendatnya aktivitas suatu organisasi.

Distorsi pesan adalah ketidaksesuaian/ketidaktepatan isi pesan yang diterima oleh anggota dengan yang dikirim oleh pengurus/pimpinan organisasi. Dalam organisasi wajar kalau terjadi adanya pemimpin atau pengurus dan bawahan atau anggota. Pengurus organisasi akan bekerja secara manajerial artinya akan mengurus hal-hal yang bersifat pengambilan keputusan atau menentukan arah gerak dari organisasi, sedangkan anggota akan melaksanakan kegiatan yang mendukung keputusan dari pengurus. Organisasi yang besar seperti PKK mempunyai pengurus di Tingkat Pusat dan daerah. Daerah masih dibagi lagi dengan daerah tk II, Kecamatan,

commit to user

Desa sampai ke tingkat RW/RT. Demikian besarnya organisasi PKK memerlukan komunikasi antara pengurus pusat dan daerah-daerah, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pusat memerlukan masukan-masukan dari daerah-daerah, demikian sebaliknya daerah memerlukan pemikiran dari pengurus pusat untuk pelaksanaan kegiatan yang telah digariskan.

Pada umumnya pimpinan suatu organisasi menyampaikan pesan kepada bawahannya hanya sebatas pada garis-garis besarnya saja, sehingga perlu adanya penafsiran kembali atas pesan yang diberikan oleh pimpinan. Organisasi besar seperti PKK, pimpinan pusat akan memberikan pesan adanya perubahan dalam nama dan kegiatan secara garis besar. Sedangkan bagaimana pelaksanaan kegiatan di daerah-daerah sangat bergantung pada kekuatan dan potensi daerah untuk dikembangkan. Isue kesetaraan gender dalam keluarga ahrus diterjemahkan kembali, disesuaikan dengan budaya masyarakat yang ada, sehingga tidak menimbulkan gejolak atau penolakan terhadap isue yang disampaikan. Dalam hal ini pimpinan daerah perlu mengemas kembali pesan-pesan dari pimpinan pusat sebelum mengkomunikasikan pesan kepada tingkat di bawahnya, di sini sangat mungkin terjadi distorsi pesan.

Distorsi pesan dapat terjadi karena beberapa faktor yang dapat dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu : factor dari dalam organisasi dan factor dari luar organisasi.

Factor dari dalam organisasi :

1. Kedudukan dalam organisasi.

Posisi seorang pimpinan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi cara orang dalam berkomunikasi. Pimpinan organisasi akan menjaga jarak ketika berhubungan dengan bawahannya, pembicaraan yang ada diusahakan terjadi secara formal dan

commit to user

singkat. Sehingga menutup kemungkinan bawahan untuk menanyakan tugas yang diberikan secara detail.

2. Hirarkhi dalam organisasi

Susunan hirarkhi dalam organisasi menunjukkan adanya seseorang yang mempunyai kedudukan superior dan yang lain adalah bawahannya. Antara pimpinan dan bawahan ada perbedaan status dan persepsi tentang organisasi. Seorang pimpinan perusahaan akan senantiasa berpikir untuk mengembangkan perusahaannya, sementara karyawan hanya berpikir tentang tugas yang diberikan. Perbedaan status dan persepsi tentang organisasi ini mempengaruhi cara berkomunikasi. Seorang pimpinan organisasi hanya membutuhkan masukan dari bawahannya, bukan suatu usulan atau lebih-lebih mengenai hal-hal yang cenderung menggancang posisi pimpinan. Sehingga dalam mendiskusikan persoalan yang ada dalam organisasi iklim komunikasi yang ada tidak sejuk lagi, masing-masing mempunyai kecurigaan tertentu.

3. Keterbatasan dalam berkomunikasi

Dalam suatu organisasi terjadi pembedaan antara pengurus dan anggota, sehingga terjadi pembedaan kelas. Pembedaan ini berakibat juga pada komunikasi dalam organisasi, pengurus hanya berkomunikasi dengan pengurus demikian juga anggota hanya akan berkomunikasi dengan anggota lainnya. Apabila terjadi komunikasi antara pengurus dengan anggota, maka komunikasi yang ada sangat terbatas dan bersifat formal.

Keterbatasan dalam berkomunikasi ini mengakibatkan pesan tidak disampaikan secara jelas, sehingga diperlukan adanya interpretasi lebih lanjut. Interpretasi ini justru berakibat adanya distorsi pesan.

4. Sistem, aturan dan kibijakan dalam organisasi

Sistem, aturan dan kebijaksanaan sangat mempengaruhi cara-cara orang dalam berkomunikasi. Organisasi mempunyai sistem, aturan yang membedakan antara pimpinan dan karyawan. Perbedaan ini juga dalam hal berkomunikasi, komunikasi yang ada bersifat personal dan formal. Akibatnya komunikasi antara karyawan dan pimpinan sangat kurang, karena terikat dengan aturan yang formal, sehingga pesan dan informasi mengalami distorsi.

Adapun factor dari luar organisasi yang mempengaruhi adanya distorsi pesan antara lain :

1. Keterbatasan individu

Dalam berkomunikasi sangat dibutuhkan adanya kemampuan individu untuk mengolah pesan yang diterimanya. Keterbatasan kemampuan individu untuk mengolah pesan akan menyebabkan adanya misscommunication yang menyebabkan adanya distorsi pesan.

2. Bahasa

Penggunaan istilah-istilah dalam bahasa seringkali mempunyai arti yang mendua, sehingga individu dalam menangkap pesan menjadi ragu-ragu. Keraguan individu ini akan menyebabkan adanya distorsi pesan.

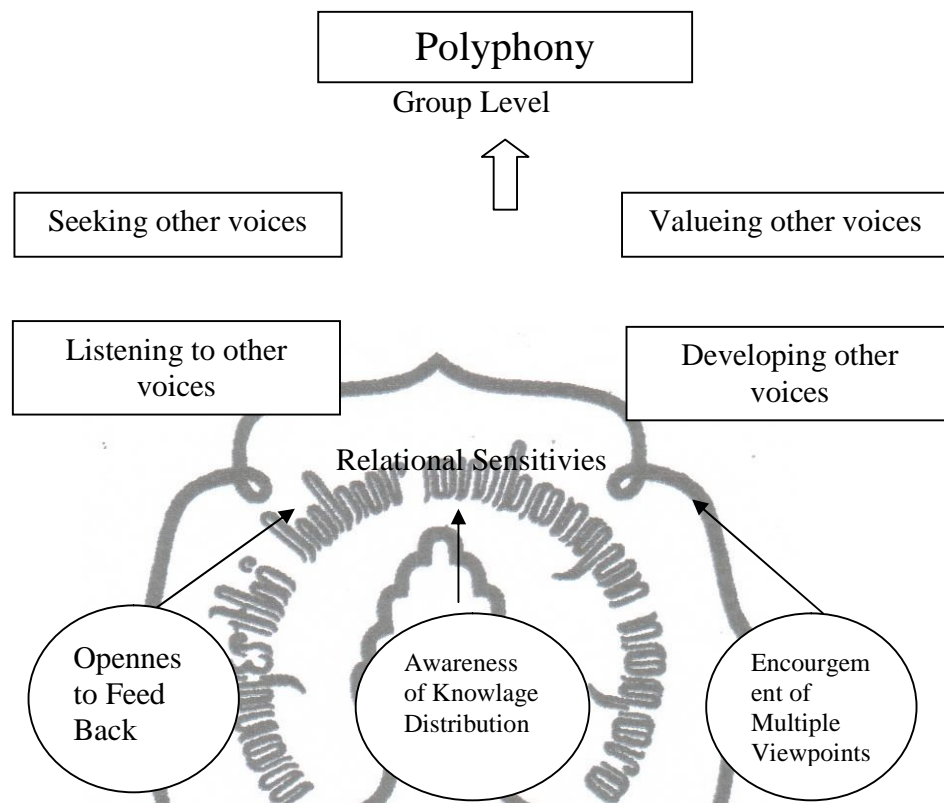
3. Framming

Dalam kehidupan bermasyarakat ada sesuatu yang sudah terkonsep dalam pikiran yang sulit untuk diubah. Adanya framing itu menyebabkan organisasi itu sulit untuk menerima hal-hal yang baru, sehingga pesan-pesan perubahan dalam organisasi tidak mendapatkan perhatian dari anggota. Organisasi PKK diidentikkan dengan organisasi perempuan yang mempunyai kegiatan arisan. Arisan ini digunakan untuk mengikat anggota agar dapat hadir pada, sehingga ketika ada pertemuan PKK mesti disebut dengan arisan PKK. Dan benar yang terjadi dalam setiap pertemuan PKK di tingkat RT, pertemuan didominasi oleh kegiatan arisan dan simpan pinjam, atau mungkin ada demo peralatan masak, sabun kecantikan, pembersih lantai, dan sebagainya. Sedangkan pembahasan tentang informasi dari PKK RW atau Desa hanya disampaikan secara sepintas saja tanpa pembahasan yang mendetail.

Sebuah organisasi akan terdiri dari bagian-bagian, dimana tiap bagian mempunyai fungsinya sendiri-sendiri dan secara keseluruhan bagian-bagian itu membentuk suatu keseluruhan. Organisasi mempunyai tujuan yang hendak dicapai, oleh karenanya anggota dalam organisasi secara bersama mendukung tujuan. Dengan demikian suatu organisasi dapat dilihat sebagai suatu system social. Dalam suatu system social komunikasi memegang peran yang sangat penting, dengan komunikasi anggota dapat menyampaikan pesan, mengutarakan pendapat. Komunikasi merupakan proses yang sangat penting dalam organisasi. Dengan komunikasi dibangun kesamaan persepsi dan tingkah laku, menekankan adanya kerjasama, meningkatkan adanya partisipasi anggota. Oleh sebab itu komunikasi sering dikatakan sebagai proses yang sangat penting dalam organisasi. Eunju Rho mengatakan : ” As the human behavior

commit to user

perspective has been important in the atmosphere to emphasize cooperation, participation, satisfaction, and interpersonal relationship among workers, communication related issues have also been recognized for organizing processes.” (2009:4). Demikian juga dengan PKK, ada komunikasi yang dibangun antara anggota dan pengurus. Karena struktur organisasi yang mengikat, hubungan antara anggota dan pengurus sangat terkait dengan posisi dalam organisasi. Akibatnya komunikasi yang ada didominasi oleh pengurus, sehingga cenderung untuk monolog. Sedangkan untuk kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, diperlukan adanya dialog yang melibatkan banyak anggota. Dalam hal ini peran komunikasi interpersonal sangat penting dalam membangun dialog. Dengan dialog pengurus dapat menyerap aspirasi anggota, menyebarkan pengetahuan dan pemahaman bersama akan tujuan, sehingga dapat melibatkan anggota dalam kehidupan organisasi. Hal ini disampaikan oleh Che Mahzan Ahmad ; “Polyphony is basically about the construction of voices of characters, with equal rights, and it is done with responsibility overseeing by the Third.” (2009 vol 2/9) Selanjutnya dikatakan :”without polyphony, dialogism is impossible” Mahzan Ahmad membuat diagram polyphony sebagai berikut :



Gambar 6 : Diagram poly phony (Mahzan Ahmad,274, vol 2/9, 2009)

Dialog antara pimpinan, dalam hal ini bisa diartikan sebagai pengurus organisasi, dengan pekerja (pengurus organisasi di level bawah) merupakan suatu hal yang mutlak di perlukan dan dikembangkan dalam sebuah organisasi. Catrin Johansson mengatakan : “new theories on leadership emphasize the important role of sensemaking, and both managers and employees speak of the importance of dialogue.” (Nordicom Review 28 (2007) 1,pp. 93-110). Dengan dialog, pimpinan organisasi akan mendapatkan umpan balik dari anggota, membagikan pengetahuan secara seimbang dan melibatkan banyak variasi pandangan, di mana semuanya itu akan mendukung jalannya kehidupan organisasi.

2. Budaya Organisasi Dalam PKK

Manusia hidup dalam penuh ketidak-pastian, dalam menghadapi ketidak-pastian tersebut, manusia hidup berkelompok. Dalam kelompoknya, mereka akan berbagi tugas untuk memenuhi kebutuhannya yang begitu banyak. Dalam masyarakat modern, individu akan masuk dalam organisasi yang akan memenuhi sebagian dari kebutuhannya. Organisasi akan dilihat sebagai suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama yang hendak dicapai. Untuk menyamakan gerak langkah anggota organisasi dan layaknya suatu kehidupan bersama, diperlukan adanya nilai dan norma yang dipahami bersama oleh anggota organisasi. Norma dan nilai dalam organisasi akan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku anggota dalam organisasi. Berdasar pada nilai dan norma pengurus akan dapat memotivasi anggota untuk melakukan sesuatu tindakan yang berguna bagi kemajuan organisasi.

Dalam kehidupan suatu kelompok manusia wajar bila terjadi pembagian tugas diantara mereka. Dalam pembagian tugas tersebut perlu adanya kelompok individu atau salah satu individu yang mengatur agar organisasi itu dapat melangsungkan kegiatannya. Individu atau sekelompok individu yang mengatur itu yang disebut dengan pengurus organisasi. Pengurus organisasi akan mengkoordinir anggota dari organisasi itu, sehingga dengan keterlibatan anggota organisasi akan berlangsung dengan lancar. Anggota suatu organisasi akan terlibat secara aktif, bila anggota mempunyai motivasi untuk berkembang bersama organisasinya. Budaya organisasi berperan dalam kelangsungan hidup organisasi. Sebagai suatu kumpulan individu yang selanjutnya disebut sebagai organisasi, memiliki nilai dan norma yang dipahami

bersama. Dengan berpegang pada nilai dan norma itu anggota organisasi paham tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana berperilaku dalam organisasinya.

Kehadiran PKK dalam penelitian ini hanya merupakan sekedar formalitas yang harus dipenuhi, yang harus ada dalam setiap RT dan RW, ada pertemuan yang diselenggarakan setiap bulannya. Sedangkan pertemuan-pertemuan yang ada di RT dan RW hanyadiisi dengan kegiatan arisan dan simpan pinjam, informasi dari PKK hanya sebagai tambahan.

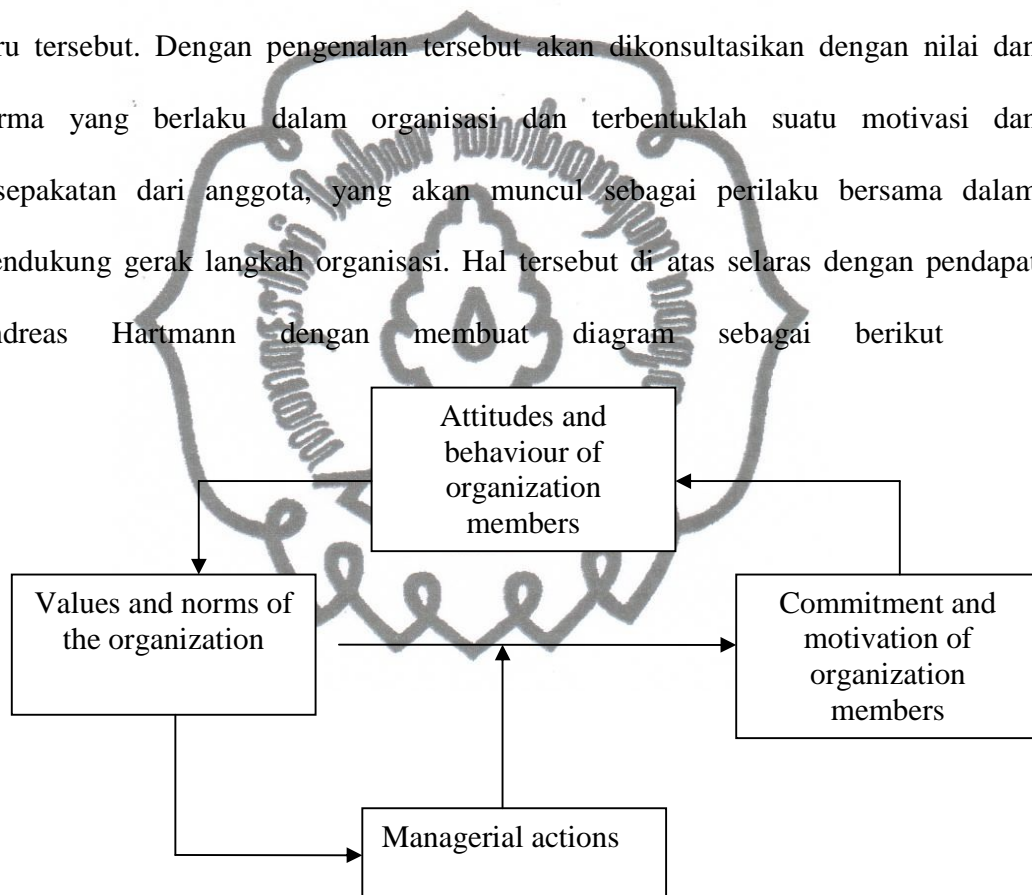
Dalam organisasi PKK yang diteliti, tidak mengembangkan fungsi budaya organisasi dengan baik. Kreativitas anggota di tingkat RT dan RW tidak diakomodir, karena segala sesuatunya ditentukan oleh tingkat yang ada di atasnya. Permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat RT dan RW harus dikonsultasikan dengan tingkat yang lebih tinggi. Identitas sebagai anggota PKK tidak diperkuat, sehingga tujuan bersama tidak dipahami oleh anggota. Hal ini mengakibatkan keterlibatan anggota pasif, tidak memahami perubahan-perubahan yang terjadi.

Interaksi anggota dengan lingkungan dalam penelitian ini cukup baik, baik dengan lingkungan dalam organisasi maupun dengan lingkungan eksternalnya. Sehingga konflik internal dan eksternal organisasi jarang terjadi. Ini dapat terjadi karena anggota PKK merupakan bagian dari lingkungan di mana PKK berada. Konflik-konflik kecil yang ada sebatas konflik antar individu. Sedangkan interaksi dengan organisasi lain tidak diketemukan dalam penelitian ini, sehingga tidak ada kerjasama dengan organisasi lain untuk mencapai tujuannya.

Dalam budaya organisasi, pengurus mempunyai tugas untuk memotivasi, mengkoordinir, mengkomunikasikan, mengendalikan agar anggota mempunyai

commit to user

kesepakatan untuk mendukung kehidupan organisasinya. Kesepakatan anggota itu ditunjukkan dalam perilaku anggota organisasi sebagai suatu kekuatan dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengurus organisasi bertugas untuk mencari terobosan-terobosan baru untuk kemajuan organisasi. Ide-ide baru itu dikomunikasi dengan anggota, sehingga anggota mempunyai pengenalan akan ide-ide baru tersebut. Dengan pengenalan tersebut akan dikonsultasikan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam organisasi dan terbentuklah suatu motivasi dan kesepakatan dari anggota, yang akan muncul sebagai perilaku bersama dalam mendukung gerak langkah organisasi. Hal tersebut di atas selaras dengan pendapat Andreas Hartmann dengan membuat diagram sebagai berikut :



Gambar 6 : Diagram gerak dan langkah organisasi
(Andreas Hartmann; 2006 : 161)

Lebih lanjut Andreas Hatmann menyatakan : “the role organization culture plays in facilitating steams from the commitment that culture can create among members of an organization in terms of believing in innovation asa an organizational value and

accepting the innovation-related norms prevalent within the organization. Committed individuals are willing to exert extra and creative effort on behalf of the organization, as the organization stands for something they personally value. This value appreciation is vital, because values are ‘what people want or consider beneficial to their welfare’ and, thus, guide their behavior.”

Sementara itu S A Masood, S S Dani, N D Burns dan C J Backhouse berpendapat bahwa organisasi itu dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) dan masing-masing mempunyai cara tersendiri dalam menggerakkan partisipasi anggotanya. Keempat budaya organisasi tersebut adalah ;

The hierarchy culture, The organizational culture compatible with this form is characterized by a formalized and structured place to work. Procedures govern what people do. Effective leaders are good coordinators and organizers. Maintaining a smooth-running organization is important. The long-term concerns of the organization are stability, predictability, and efficiency. Formal rules and policies hold the organization together. Large organization and government agencies are generally dominated by a hierarchy culture, as evidenced by large numbers of standardized procedures, multiple hierarchical levels, and an emphasis on rule reinforcement.

The market culture, the term market is not synonymous with the market function or with customers in the market-place. Rather, it refers to a type of organization, which functions as a market itself. It is oriented towards the external environment instead of internal affairs. It is assumed that a clear purpose and an aggressive strategy lead to hard-driving producers and competitive actions and achieving

commit to user

stretch goals and targets. Success is defined in terms of market share and penetration. Outpacing the competition and market leadership are important.

The clan culture is called a clan because of its similarity to a family-type organization. They seemed more like extended families than economic entities. Instead of the rules and procedures of hierarchies or the competitive profit centres of market, typical characteristics of clan-type firms were teamwork, employee involvement programmes, and corporate commitment to employees. These characteristics were evidenced by semi-autonomous work team (and not individual) accomplishment and that hired and fired their own members, quality circles that encouraged workers to voice suggestions regarding how to improve their own work and the performance of the company, and an empowering environment for employees. Some basic assumptions in a clan culture are that the environment can best be managed through teamwork and employee development, customers are best thought of as partners, the organization is in business of developing a humane work environment, and the major task of management is to empower employees and to facilitate their participation, commitment, and loyalty.

The clan culture, as assessed in the OCAI questionnaire, is typified by a friendly place to work where people share much of themselves. It is like an extended family. Leaders are thought of as mentors and, perhaps, even as parent figures. The organization emphasizes the long-term benefit of individual development with high cohesion and morale being important. Success is defined in terms of internal climate and concern for people. The organization places a premium on teamwork, participation, and consensus.

commit to user

The adhocracy culture, as assessed in theOCAI questionnaire, is characterized by a dynamic, entrepreneurial, and creative workplace. People stick their necks out and take risks. Effective leadership is visionary, innovative, and risk oriented. The glue that holds the organization together is commitment to experimentation and innovation. The emphasis is on being at the leading edge of new knowledge, products, and/or services. Readiness for change and meeting new challenges are important. The organization's long-term emphasis is on rapid growth and acquiring new resources. Success means producing unique and original products and services.

Dari keempat budaya organisasi tersebut yang relevan dengan penelitian ini adalah the hierarchy culture, karena struktur organisasi yang mengikuti struktur organisasi pemerintahan mulai dari tingkat pusat yang berada di ibukota Negara hingga tingkat kecamatan dan desa. Organisasi dengan budaya organisasi hirarkhi cenderung menerapkan komunikasi "top-down", petunjuk atasan merupakan sumber yang paling benar. Budaya organisasi hirarkhi ini mematikan adanya inovasi dan kreativitas anggota dalam mengembangkan organisasi. Keterlibatan anggota sebatas pada pelaksanaan hasil musyawarah pengurus di tingkat atas. Kreativitas dan inovasi anggota tidak mendapatkan tempat, karena segala sesuatunya mengacu dari atasannya.

3. Pemberdayaan Perempuan Dalam PKK

Pemberdayaan merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh PKK, dan dengan pemberdayaan ini diharapkan terjadi adanya kesetaraan gender yang akan memunculkan adanya kesejahteraan dalam keluarga. Perubahan tujuan ini tentu saja harus diperjuangkan, karena pemberdayaan yang menuju pada kesejahteraan

commit to user

merupakan perubahan budaya dalam masyarakat. Perjuangan perempuan untuk mencapai haknya harus diimbangi oleh kerelaan laki-laki melepaskan kenikmatan budaya patriarkhi yang telah melekat kuat dalam masyarakat. Dan hingga saat ini kebanyakan laki-laki masih menganut budaya patriarkhi, demikian juga dengan perempuannya. Akibatnya perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan yang menjadi haknya terhambat. Hambatan ini haruslah dicarikan solusinya, sependapat dengan Arni Muhammad bahwa usaha pemberdayaan itu melalui beberapa tahap :

1. Tahap penyadaran : menyadarkan anggota PKK bahwa ada perbedaan jenis kelamin yang merupakan hak prerogratif Sang Pencipta, sehingga manusia sebagai ciptaanNYA tidak mampu mengubahnya. Perbedaan jenis kelamin ini tidak mempengaruhi adanya perbedaan pekerjaan.
2. Tahap transformasi : membuka wawasan anggota bahwa perbedaan jenis pekerjaan yang ada dalam masyarakat merupakan konstruksi social yang dapat diubah oleh manusia, sehingga baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tanggung jawab bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan keluarga.
3. Tahap peningkatan : berupa kesetaraan yang dapat diupayakan sehingga tidak ada lagi dominasi dari salah satu pihak kepada pihak yang lain, sehingga suasana keluarga yang harmonis dapat tercapai.

Pemberdayaan membutuhkan komunikasi timbal balik yang setara, artinya ada suatu bentuk komunikasi kemitraan yang terjadi dalam organisasi PKK. Pengurus bukan lagi penguasa yang memberikan perintah kepada bawahan, tetapi pengurus memberikan suatu konsep yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan inisiatif

commit to user

pengurus di tingkat RW/RT. Dalam penelitian ini nampak dalam kegiatan POSYANDU, di mana pengurus di tingkat kecamatan dan desa hanya memberikan arahan. Proses selanjutnya kegiatan POSYANDU dikembangkan sendiri oleh anggota PKK. Kegiatan Posyandu dapat berlangsung dan berkembang dengan baik, karena komunikasi organisasi dan budaya organisasi diberlakukan. Partisipasi dan kreativitas anggota diakomodir dalam kegiatan. Perkembangan Posyandu dapat dilihat dari aktivitas yang ada, dimana semula Posyandu hanya diperuntukkan bagi balita saat ini berkembang dengan munculnya Posyandu Lansia. Keberlangsungan Posyandu Balita ditopang sepenuhnya oleh anggota PKK dengan sukarela, pembagian kerja dilakukan tanpa paksaan. Bahkan pendanaannya ditanggung oleh PKK. Kegiatan-kegiatan ini berlangsung karena ada perasaan memiliki diantara anggota, sehingga kegiatan itu direncanakan dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Dukungan pemerintah hanya berupa tenaga paramedis yang mengarahkan pada cara-cara pencatatan, dan pengarahan seperlunya. Pengarahan pada pencatatan yang dipergunakan untuk monitoring kesehatan balita, dan bukan berupa instruksi yang kaku, sehingga mudah dipahami bersama.

Keberhasilan suatu pemberdayaan dapat dilihat dari akses dan control anggota atau pihak yang diberdayakan. Demikian juga dengan PKK yang bertujuan melakukan pemberdayaan dengan menghembuskan adanya kesetaraan gender menuju pada kesejahteraan keluarga. Ini merupakan suatu paradigma baru yang dilontarkan PKK, suatu kesetaraan gender. Untuk mencapai kesetaraan tersebut ada perubahan yang agak mendasar dalam tubuh PKK yaitu masalah keanggotaan, di mana laki-laki juga menjadi anggota PKK. Kesetaraan memang harus terjadi karena adanya kerelaan

commit to user

antara laki-laki dan perempuan untuk saling berbagi dan tidak saling mendominasi. Dalam penelitian ini yang ditemukan masih berlakunya konstruksi social atas perbedaan pekerjaan yang berdasarkan jenis kelamin. Ini terlihat dari sepuluh program pokok PKK yang sarat dengan proses peminggiran perempuan. Sedangkan pemberdayaan semestinya harus meninggalkan proses peminggiran peran perempuan dalam keluarga maupun masyarakat.

Komunikasi organisasi, budaya organisasi dan pemberdayaan:

Melihat uraian di atas dapat diambil simpulan bahwa komunikasi organisasi bicara tentang pentingnya komunikator dalam memilih media yang akan digunakan dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikator hanya menyampaikan pesan dan memilih media supaya pesan dapat diterima oleh komunikan, tanpa harus memperhitungkan bagaimana kelanjutan dari pesan yang disampaikan. Dalam penelitian ini komunikator menyampaikan pesan yang sudah digariskan dari atasannya, tanpa mengubah cara atau mencari kreativitas lain agar anggota PKK dapat melakukan aktivitas yang telah digariskan dengan kreativitas anggota. Akibatnya organisasi PKK merupakan organisasi yang “jalan di tempat”, tidak ada inovasi dan kreativitas anggota untuk mengembangkan pesan sesuai dengan potensi yang ada.

Dilihat dari budaya organisasinya, PKK tidak mengembangkan budaya organisasi yang mengutamakan inovasi dan kretivitas anggota. Komunikasi yang bersifat “top-down” hanya memberikan instruksi-instruksi yang memerlukan pengembangan lebih lanjut, sedangkan para pengurus hanya melakukan apa yang digariskan oleh atasannya. Ini dikarenakan budaya hirarkhi organisasi yang membelenggu anggota

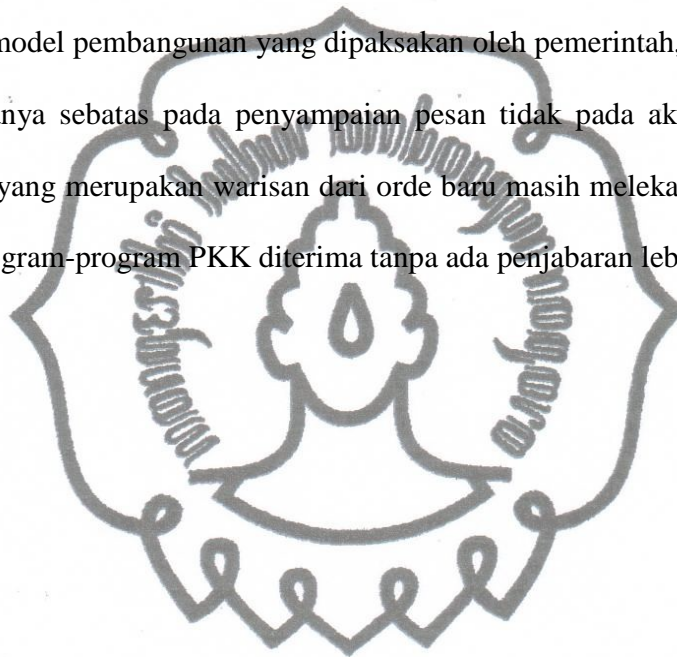
commit to user

untuk tidak berkreasi. Kemandegan dalam pengembangan organisasi PKK dapat dimaklumi karena munculnya PKK bukan muncul dari kesadaran anggota, tetapi lebih bersifat pemaksaan agar semua gerakan perempuan dapat dipantau secara terus menerus oleh penguasa. Perubahan yang ada dalam PKK tidak ditanggapi positif oleh anggota, sehingga apa yang telah ada itu yang dipahami. Ketua PKK yang seharusnya tidak harus dijabat oleh istri ketua RT/RW tidak dipahami oleh anggota, sehingga ketika terjadi pemilihan ketua RT/RW dipilih orang yang mempunyai istri.

Perubahan nama dalam PKK menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tidak membawa perubahan yang berarti sama sekali, karena sepuluh program pokok PKK masih menjadi program andalan. Sementara sepuluh program pokok PKK tersebut penuh dengan marginalisasi perempuan. Dalam hal ini nampak bahwa perubahan yang ada hanya sebatas nama yang ada dalam permukaan, tidak menyentuh pada inti dan identitas organisasi yang harus dipahami oleh anggota PKK. Perubahan yang tidak dipahami oleh anggota tidak akan membawa perubahan dalam organisasi, karena budaya organisasi yang dipahami oleh anggota adalah budaya yang telah lama hidup dalam organisasi PKK. Dimana PKK sebagai “tangan-panjang” pemerintah dalam mengawasi dan membatasi gerakan-gerakan perempuan, sehingga ruang gerak PKK selalu menurut dengan petunjuk atasan. Akibatnya inovasi dan kreativitas anggota tidak dilibatkan dalam kehidupan organisasi, dan ini yang menyebabkan adanya kemandegan dan kehidupan yang monoton dalam organisasi PKK. Sebenarnya organisasi PKK dapat berlangsung bila mengkombinasikan alur komunikasi ke bawah dengan model komunikasi kemitraan, sehingga apa yang

diinstruksikan dari atasan dapat diterapkan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat anggota.

Model kemitraan hampir sama dengan model budaya organisasi, dalam model pendekatan kemitraan berpusat pada rakyat, sehingga datangnya ide dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan dukungan dari pemerintah. Pemberdayaan yang ada di PKK merupakan model pembangunan yang dipaksakan oleh pemerintah, sehingga program yang ada hanya sebatas pada penyampaian pesan tidak pada aksi. Budaya tunduk pada atasan yang merupakan warisan dari orde baru masih melekat kuat dalam PKK, sehingga program-program PKK diterima tanpa ada penjabaran lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan – kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan/mengurus suatu organisasi, komunikasi organisasi mutlak diperlukan guna memberikan arah yang jelas kepada anggota tentang tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut.
2. Dalam organisasi diperlukan adanya budaya organisasi, di mana dengan budaya organisasi, anggota mempunyai nilai dan norma yang digunakan sebagai pedoman perilaku interaksinya dengan anggota yang lain, dengan pengurus organisasi.
3. Perubahan dalam organisasi, baik dari nama, tujuan dan misinya, penting untuk dikomunikasikan dengan anggota. Ini penting karena dengan pemahaman tentang perubahan, anggota akan menyesuaikan dengan perubahan yang lain.

B. Implikasi Metodologis

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan interaktif model. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan di RW/RT dan untuk menjaga validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber. Metode ini cukup memadai untuk penelitian, tetapi untuk lebih memantapkan penelitian perlu dilihat prosesnya. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan pula observasi dengan melihat secara langsung proses komunikasi yang terjadi pada waktu pertemuan PKK berlangsung dan pembinaan yang terjadi.

commit to user

Dengan menerapkan observasi secara langsung dan wawancara mendalam, maka akan diperoleh data yang mantap untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga hasil penelitian akan lebih baik.

C. Saran

Dari hasil penelitian yang didapatkan, maka diajukan saran untuk pengurus, pimpinan organisasi dalam meningkatkan kinerja anggotanya, perlu untuk :

- a. Memperhatikan komunikasi antara atasan dan bawahan, karena dengan perhatian ini bawahan akan merasa memiliki organisasi
- b. Komunikasi yang terlalu kaku lebih banyak merugikan organisasi, karena segala informasi akan ditanggapi secara formal, sehingga iklim komunikasi dan iklim organisasi akan berjalan dengan sangat formal.